



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 48 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023- 2027

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana Tim Penerapan SPM Daerah salah satu tugasnya yaitu mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bengkayang Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4)
11. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 – 2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
9. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disebut RAD-SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2023 - 2027.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - g. pelayanan kesehatan balita;
 - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut
 - k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 - o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
 - p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah;
 - s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - u. pelayanan informasi rawan bencana;
 - v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
 - y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 (satu) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Cakupan tahapan-tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KOORDINASI PENERAPAN SPM

Pasal 5

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.
- (2) Dalam penerapan SPM, Bupati dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Kalimantan Barat.

Pasal 6

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim Penerapan SPM Daerah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Penerapan SPM di Daerah dibebankan pada APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
RAD-SPM

Pasal 8

- (1) RAD-SPM bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu target dan capaian jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 9

- (1) Target dan capaian jangka menengah terintegrasi dengan RPJMD dan diakomodir pada Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Target dan capaian jangka pendek terintegrasi dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kondisi dan permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM
 - c. BAB III : Strategi, Pemenuhan Penerapan SPM
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM
 - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran

- (2) Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

RAD-SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi RAD-SPM, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaporan target capaian penerapan SPM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi dan bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dimulai dari tahap pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM terhadap Perangkat Daerah meliputi:

- a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan RAD-SPM;
- b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM Perangkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR ...48

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunianya sehingga Peraturan Bupati Bengkayang tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Renaksi Penerapan SPM Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2023-2027 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Kabupaten Bengkayang melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Renaksi Penerapan SPM Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023-2027 ini. Semoga Renaksi Penerapan SPM Daerah ini mampu memberikan perubahan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| 1.2. TUJUAN DAN SASARAN | 2 |
| 1.3. KONDISI UMUM WILAYAH | 2 |
| 1.4. DASAR HUKUM PENERAPAN SPM..... | 8 |
| 1.5. TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM..... | 9 |
| BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM..... | 11 |
| 2.1. KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM..... | 11 |
| 2.2. PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM..... | 28 |
| BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM..... | 37 |
| 3.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI..... | 37 |
| 3.2. MATRIKS RENCANA AKSI PENERAPAN SPM..... | 45 |
| BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM..... | 98 |
| 4.1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM | 98 |
| 4.2. PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM | 103 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 105 |
| 5.1. KESIMPULAN | 105 |
| 5.2. SARAN | 105 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 2.1 Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023..... | 11 |
| Tabel 2.3 Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023..... | 17 |
| Tabel 2.4 Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023..... | 18 |
| Tabel 2.5 Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023..... | 21 |
| Tabel 2.6 Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023..... | 22 |
| Tabel 2.7 Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023..... | 26 |
| Tabel 3.1 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pendidikan Bengkayang 2023-2027..... | 45 |
| Tabel 3.2 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Kesehatan Bengkayang 2023-2027..... | 49 |
| Tabel 3.3 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum Bengkayang 2023-2027 | 62 |
| Tabel 3.4 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Perumahan Rakyat Bengkayang 2023-2027 | 67 |
| Tabel 3.5 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang 2023-2027..... | 72 |
| Tabel 3.6 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Sosial Kabupaten Bengkayang 2023-2027..... | 82 |
| Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM | 103 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggung jawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, Pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak di peroleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanis mepenerapan SPM.

SPM di posisikan untuk menjawab isu-isukrusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjagakelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan public secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bengkayang

menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan arah yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam mencapai sasaran meningkatnyaak sebilas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan system manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi di berbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penerapan SPM menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang, untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkayang Penyusun Renaksi penerapan SPM Daerah yang memuat target tahunan pencapaian SPM mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Teknis. Rencana pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), target tahunan pencapaian SPM dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

1.3. Kondisi Umum Wilayah

Secara geografis Kabupaten Bengkayang berada pada posisi 108,39⁰⁰” Bujur Timur sampai 110⁰10’00” Bujur Timur dan antara 0,33⁰⁰ Lintang

Utara sampai 1°30'00" Lintang Utara. Batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara dengan Kabupaten Sambas dan Serawak (Malaysia Timur).
- 2) Sebelah selatan dengan Kabupaten Mempawah
- 3) Sebelah Timur dengan Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau.
- 4) Sebelah Barat dengan Pemerintah Kota Singkawang dan Laut Natuna.

Dengan letak geografis sebagaimana di atas Kabupaten Bengkayang mempunyai panjang garis pantai sepanjang 36,5 Km, dan panjang garis perbatasan dengan Malaysia Bagian Timur (Serawak) 89,5 Km, dan memiliki 12 (dua belas) buah pulau, yang diantaranya 6 buah pulau belum berpenghuni.

TABEL 1.1
BATAS ADMINISTRASI
KABUPATEN BENGKAYANG

| Batas Administrasi <i>Administration Border</i> | Berbatasan dengan <i>Border On</i> |
|---|--|
| (1) | (2) |
| Sebelah Utara | Kabupaten Sambas Serawak (Malaysia Timur) |
| Sebelah Selatan | Kabupaten Mempawah |
| Sebelah Timur | Kabupaten Landak Kabupaten Sanggau |
| Sebelah Barat | Kota Singkawang Laut Natuna |

Sumber/Source : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2022

TABEL 1.2
BATAS ADMINISTRASI DAN PANJANG PERBATASAN
KABUPATEN BENGKAYANG

| Batas Administrasi <i>Administration Border</i> | Panjang Perbatasan <i>Border Length</i> (Km) |
|---|--|
| (1) | (2) |
| Kabupaten Sambas | 126 |
| Kabupaten Landak | 168 |
| Kabupaten Mempawah | 54 |
| Kabupaten Sanggau | 31 |
| Kota Singkawang | 59 |

Sumber/Source : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2022

**BATAS-BATAS WILAYAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

| Kecamatan District | Utara North | Timur East | Selatan South | Barat West |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Sungai Raya | S Raya Kep. | Capkala | Kab. Mempawah | Laut Natuna |
| 2. Capkala | S. Raya Kep. | Monterado | Kab. Mempawah | Sungai Raya |
| 3. Sungai Raya Kepulauan | Kota Singkawang | Monterado | Sungai Raya | Laut Natuna |
| 4. Samalantan | Lembah Bawang | Sungai Betung | Kab. Landak | Monterado |
| 5. Monterado | Kota Singkawang | Samalantan & Lembah Bawang | Kab. Mempawah | Capkala |
| 6. Lembah Bawang | Kab. Sambas | Lumar | Samalantan | Monterado |
| 7. Bengkayang | Lumar | Teriak | Kab. Landak | Sungai Betung |
| 8. Teriak | Suti Semarang | Kab. Landak | Kab. Landak | Bengkayang |
| 9. Sungai Betung | Lumar | Bengkayang | Kab. Landak | Samalantan |
| 10. Ledo | Kab. Sambas | Sanggau Ledo | Suti Semarang | Lumar |
| 11. Suti Semarang | Tujuh Belas | Kab. Landak | Teriak | Ledo |
| 12. Lumar | Kab. Sambas | Ledo | Bengkayang | Lembah Bawang |
| 13. Sanggau Ledo | Kab. Sambas | Seluas & Tujuh Belas | Ledo | Kab. Sambas |
| 14. Tujuh Belas | Seluas | Kab. Landak | Suti Semarang | Sanggau Ledo |
| 15. Seluas | Jagoi Babang | Siding | Tujuh Belas | Kab. Sambas |
| 16. Jagoi Babang | Serawak | Siding | Seluas | Kab. Sambas |
| 17. Siding | Serawak | Kab. Sanggau | Kab. Landak | Seluas |

Sumber/Source : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2022

Kabupaten Bengkayang memiliki luas wilayah 5.396,30 Km² atau sekitar 3,68 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat, memiliki topografi

sangat bervariasi sebagian tanah datar, sebagian bergelombang namun ada beberapa daerah yang berbukit bahkan menyerupai gunung. Jenis tanah yang dimiliki mempunyai sifat dan ciri jenis Organosol, Alluvial, Padsolid Merah Kuning, Podsol dan Latosol.

Dilihat dari luas masing-masing kecamatan, Kecamatan Jagoi Babang merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bengkayang dengan cakupan wilayah sebesar 655 km² atau sekitar 12,14 persen dari luas Kabupaten Bengkayang keseluruhan dan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,35 km² atau hanya sekitar 0,86 persen dari total luas Kabupaten Bengkayang.

Dilihat dari jarak tempuh terjauh dari ibukota kecamatan ke ibu kota kabupaten di Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Siding adalah kecamatan dengan jarak tempuh terjauh, yaitu sekitar 103,68 km disusul Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Sungai Raya.

TABEL 1.6
PERSENTASE LUAS KABUPATEN BENGKAYANG
MENURUT KECAMATAN

| Kecamatan <i>District</i> | Luas <i>Area</i> (Km ²) | Persentase <i>Percentage</i> (%) |
|------------------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Sungai Raya | 75,85 | 1,41 |
| 2. Capkala | 46,35 | 0,86 |
| 3. Sungai Raya Kepulauan | 394,00 | 7,30 |
| 4. Samalantan | 420,50 | 7,79 |
| 5. Monterado | 291,00 | 5,39 |
| 6. Lembah Bawang | 188,00 | 3,48 |
| 7. Bengkayang | 167,04 | 3,10 |
| 8. Teriak | 231,51 | 4,29 |
| 9. Sungai Betung | 205,95 | 3,82 |
| 10. Ledo | 481,75 | 8,93 |
| 11. Suti Semarang | 280,84 | 5,20 |
| 12. Lumar | 275,21 | 5,10 |
| 13. Sanggau Ledo | 392,50 | 7,27 |
| 14. Tujuh Belas | 221,00 | 4,10 |
| 15. Seluas | 506,50 | 9,39 |
| 16. Jagoi Babang | 655,00 | 12,14 |

| Kecamatan <i>District</i> | Luas Area (Km ²) | Persentase Percentage (%) |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 17. Siding | 563,30 | 10,44 |
| Jumlah/ Total | 5 396,30 | 100,00 |

Sumber/Source : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2022

TABEL 1.7
JARAK IBU KOTA KECAMATAN KE IBUKOTA
KABUPATEN BENGKAYANG

| Kecamatan <i>District</i> | Ibukota Kecamatan | Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km ²) |
|------------------------------|----------------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Sungai Raya | Sungai Duri | 89,56 |
| 2. Capkala | Capkala | 72,32 |
| 3. Sungai Raya Kepulauan | Sungai Raya | 72,56 |
| 4. Samalantan | Samalantan | 37,39 |
| 5. Monterado | Monterado | 53,18 |
| 6. Lembah Bawang | Papan Uduk | 57,39 |
| 7. Bengkayang | Bengkayang | 0 |
| 8. Teriak | Bana | 13,76 |
| 9. Sungai Betung | Suka Maju | 14,84 |
| 10. Ledo | Ledo | 31,01 |
| 11. Suti Semarang | Suti Semarang | 67,03 |
| 12. Lumar | Lumar | 16,94 |
| 13. Sanggau Ledo | Lembang | 49,60 |
| 14. Tujuh Belas | Pisak | 61,60 |
| 15. Seluas | Seluas | 76,08 |
| 16. Jagoi Babang | Jagoi | 89,96 |
| 17. Siding | Siding | 103,68 |
| | | |

Sumber/Source : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2022

❖ Topografis

Ada dua kondisi alam yang membedakan wilayah Kabupaten Bengkayang. Kondisi alam yang pertama adalah pesisir pantai. Keseluruhan wilayah pesisir ini termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Kondisi alam yang kedua adalah daratan dan perbukitan yang terdiri dari Kecamatan Capkala, Samalantan, Monterado, Lembah Bawang, Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, Ledo, Suti Semarang, Lumar, Sanggau Ledo, Tujuh Belas, Seluas, Jagoi Babang, dan Siding.

Bengkayang adalah jenis tanah podsolik merah kuning, yaitu sebesar 3.223,47 kilometer persegi dan yang paling sedikit adalah jenis OGH, yaitu sebesar 67 kilometer persegi.

Dilihat dari persebaran lerengnya, sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkayang masuk pada kelas lereng 15-40 % dan hanya sebagian kecil yang masuk dalam kelas lereng lebih dari 40 %. Selanjutnya, dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar masuk dalam tekstur sedang, yaitu sebesar 3.430,23 kilometer persegi. Luas wilayah tergenang di Kabupaten Bengkayang hanya sebesar 360,20 kilometer persegi dan luas wilayah yang tidak tergenang adalah sebesar 5.036,10 kilometer persegi.

Walaupun hanya sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkayang yang merupakan wilayah perairan laut, Kabupaten Bengkayang juga memiliki sejumlah pulau, yaitu sebanyak 12 pulau. Dari sejumlah pulau tersebut, ada sebanyak 6 pulau masih belum berpenghuni dan 6 pulau sudah berpenghuni. Semua pulau yang ada terletak di wilayah perairan Laut Natuna. Pulau terbesar yang berpenghuni adalah Pulau Lemukutan dan Pulau Kabung.

❖ Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkayang dari sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang semester 2 (dua) tahun 2022 mencapai 290.588 jiwa yang terdiri dari laki-laki 150.920 dan perempuan 139.668.

Jika jumlah penduduk dirinci menurut kecamatan maka jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Monterado sebanyak 34.189 Jiwa (11,77%) sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Suti Semarang sebanyak 6.226 jiwa (2,14).

1.4. Dasar Hukum Penerapan SPM

Dasar Hukum yang menjadi landasan penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
9. Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4).
10. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 1).

1.5. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus di hadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Tim penerapan SPM dalam menyusun strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kabupaten Bengkayang yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh Tim Penerapan SPM dalam merumuskan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat Inisiasi yang berisisolusi dan Inovasi yang dapat di terapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM nya, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus di pedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Kabupaten maupun Kabupaten/Kota.

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

BAB II

2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Bengkulu 2021-2026 terdapat beberapa focus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1. Bidang Pendidikan

Tabel 2.1 Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Bengkulu

Tabel 2.2 Tahun 2022

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | SATUAN | CAPAIAN (%) | PAGU | REALISASI | PERSENTASE (%) |
|----|---------------------------------------|---|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 1 | Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini | Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD | 1 | Peserta didik | 100% | 3,000,000 | 3,000,000 | 100% |
| | | | 2 | Kegiatan | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 3 | Peserta didik | 100% | 100,000,000 | 100,000,000 | 100% |
| | | | 4 | Peserta didik | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 5 | Peserta didik | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 6 | Peserta didik | 0% | 0 | 0 | 0% |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | SATUAN | CAPAIAN (%) | PAGU | REALISASI | PERSENTASE (%) | |
|----|---------|---|--------------|--|----------------------------------|--------|-------------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan | 1 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | Kegiatan | 100% | 149,370,000 | 149,370,000 | 100% |
| | | | 2 | Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | Kegiatan | 100% | 52,382,000 | 52,382,000 | 100% |
| | | | 3 | Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran | Kegiatan | 100% | 49,370,000 | 49,370,000 | 100% |
| | | | 4 | Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Kegiatan | 97,64% | 42,356,000 | 41,356,000 | 97,64% |
| | | | 5 | Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak | Kegiatan | 99,31% | 425,389,500 | 422,458,500 | 99,31% |
| | | Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) | 1 | Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Pendidik dan tenaga kependidikan | 81,43% | 3,320,267 | 2,703,600 | 81,43% |
| | | | 2 | Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | 94,35% | 2,624,583 | 2,476,400 | 94,35% |
| | | | 3 | Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Guru | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 4 | Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | Kegiatan | 98,26% | 987,050,991 | 969,832,128 | 98,26% |
| | | | 5 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah | Kegiatan | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 6 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah | Kegiatan | 0% | 0 | 0 | 0% |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | SATUAN | CAPAIAN (%) | PAGU | REALISASI | PERSENTASE (%) | | |
|----|------------------------------|--|---|---|---|----------------|------------|----------------|-------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | | Pemenuhankualitaspendidik dan tenagakependidikan (PAUD) | 7 | Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidika nanak usia dini | Pengawas sekolah atau penilik | 81,43% | 3,320,267 | 2,703,600 | 81,43% | |
| | | | 1 | Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan | Kegiatan | 60,76% | 48,929,200 | 29,727,100 | 60,76% | |
| | | | 2 | Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensipendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| | | | 3 | Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak | Kegiatan | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 2 | Program SPM Pendidikan Dasar | Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) | 1 | Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampaidengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah | Peserta didik | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| | | | 2 | Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus | Peserta didik | 0% | 2,100,000 | 0 | 0% | |
| | | | 3 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung | Peserta didik | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| | | | 4 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal | Peserta didik | 0% | 4,750,000 | 0 | 0% | |
| | | 1 | Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) | 1 | Pembentukankomunitasbelajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut | Unit komunitas | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | | 2 | Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru | Kegiatan | 100% | 283,401,000 | 283,401,000 | 100% |
| | | 1 | Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan | 1 | Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan | Kegiatan | 0% | 0 | 0 | 0% |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | SATUAN | CAPAIAN (%) | PAGU | REALISASI | PERSENTASE (%) | |
|----|---------|--|--------------|--|----------------------------------|--------|---------------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) | 1 | kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | | | | | |
| | | | 2 | Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Kegiatan | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 3 | Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat | Kegiatan | 0% | 417,000,000 | 0 | 0% |
| | | | 4 | Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk penting nyainklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasiter hadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahunajaran | Kegiatan | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | Pemenuhan jumlahpen didik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) | 1 | Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Pendidik dan tenaga kependidikan | 81,43% | 0 | 2,703,600 | 81,43% |
| | | | 2 | Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan | Guru | 94,35% | 2,624,583 | 2,476,400 | 94,35% |
| | | | 3 | Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Guru | 1,57% | 133,038,000 | 2,090,000 | 1,57% |
| | | | 4 | Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | Kegiatan | 96,00% | 5.665,179,467 | 5,438,509,692 | 96,00% |
| | | | 5 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepalas ekolah | Kegiatan | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 6 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah | Kegiatan | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 7 | Pemetaan kecuku panjumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan | Pengawas | 81,43% | 3,320,267 | 2,703,600 | 81,43% |
| | | Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga | 1 | Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum | Kegiatan | 0% | 0 | 0 | 0% |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | SATUAN | CAPAIAN (%) | PAGU | REALISASI | PERSENTASE (%) | | |
|----|-----------------------------------|---|--|---|--|----------------|-----------|----------------|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | | kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) | | memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan | | | | | | |
| | | | 2 | Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| | | | 3 | Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak | Kegiatan | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 3 | Program SPM Pendidikan Kesetaraan | Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan) | 1 | Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampaidengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah | Peserta didik | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| | | | 2 | Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus | Peserta didik | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| | | | 3 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan dayatampung | Peserta didik | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| | | | 4 | Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal | Peserta didik | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| | | | Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan) | 1 | Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut | Unit komunitas | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | | 2 | Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru | Kegiatan | 99.35 % | 283,401,000 | 281,551,000 | 99.35 % |
| | | | Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan) | 1 | Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan | Kegiatan | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | | 2 | Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Kegiatan | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | | 3 | Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat | Kegiatan | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | | 4 | Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah | Kegiatan | 0% | 0 | 0 | 0% |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | SATUAN | CAPAIAN (%) | PAGU | REALISASI | PERSENTASE (%) | |
|----|---------|--|--|---|----------------------------------|---------|-----------|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | diskriminasi terhadap pekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran | | | | | | |
| | | Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) | 1 | Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun | Pendidik dan tenaga kependidikan | 81.43 % | 3,320,267 | 2,703,600 | 81.43 % |
| | | | 2 | Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | 94.35 % | 2,624,583 | 2,476,400 | 94.35 % |
| | | | 3 | Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Guru | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 4 | Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif | Kegiatan | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 5 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah | Kegiatan | 81.43 % | 1,660,133 | 1,351,800 | 81.43 % |
| | | | 6 | Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah | Kegiatan | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 7 | Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan | Pengawas Sekolah | 81.43 % | 3,320,267 | 2,703,600 | 81.43 % |
| | | Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) | 1 | Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan | Kegiatan | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 2 | Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidik dan tenaga kependidikan | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 3 | Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak | Kegiatan | 0% | 0 | 0 | 0% |

Sumber: Pelaporan E-SPM Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

2.2.2. Bidang Kesehatan

Tabel 2.3 Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | SATUAN | CAPAIAN (%) | PAGU | REALISASI | PERSENTASE (%) | |
|----|---|--|--------------|---|-------------|--------|-------------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil | Orang | 98,30% | 768,880,000 | 755,830,000 | 98,30% |
| | | | 2 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin | Orang | 73,80% | 938,434,600 | 692,573,350 | 73,80% |
| | | | 3 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir | Orang | 92,07% | 423,129,455 | 389,555,000 | 92,07% |
| | | | 4 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita | Orang | 99,49% | 2,111,528 | 2,100,776 | 99,49% |
| | | | 5 | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Orang | 99,33% | 861,868,450 | 856,120,000 | 99,33% |
| | | | 6 | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif | Orang | 97,65% | 852,722,000 | 832,668,750 | 97,65% |
| | | | 7 | Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut | Orang | 97,03% | 694,488,644 | 673,851,444 | 97,03% |
| | | | 8 | Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi | Orang | 100% | 403,572,000 | 403,568,750 | 100% |
| | | | 9 | Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus | Orang | 100% | 317,722,000 | 317,718,750 | 100% |
| | | | 10 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat | Orang | 90,79% | 421,132,000 | 382,328,750 | 90,79% |
| | | | 11 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Orang | 98,25% | 456,320,000 | 448,320,000 | 98,25% |
| | | | 12 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Orang | 95,91% | 250,640,000 | 239,390,000 | 95,91% |
| | | | 13 | Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Dokumen | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 14 | Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi sibenca | Dokumen | 0% | 0 | 0 | 0% |

Sumber : Pelaporan E-SPM Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

2.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.4 Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Bengkulu Tahun 2022

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | SATUAN | CAPAIAN (%) | PAGU | REALISASI | PERSENTASE (%) |
|----|--|---|--------------|---|---------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah | 1 | Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM | Dokumen | 98.58 % | 645,022,500 | 635,861,000 | 98.58 % |
| | | | 2 | Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM | Dokumen | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 3 | Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan | Liter/Detik | 95.30 % | 1,564,800,000 | 1,491,281,000 | 95.30 % |
| | | | 4 | Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasanPerdesaan | SR | 95,31% | 5,889,625,000 | 5,613,290,500 | 95,31% |
| | | | 5 | Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan | Liter/Detik | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 6 | Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasanPerdesaan | Liter/Detik | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 7 | Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan | SR | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 8 | Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan | SR | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 9 | Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum | Orang | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 10 | Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri | Badan Usaha | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 11 | Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat | Kelompok Masyarakat | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 12 | Fasilitasi penyiapan kerjasama SPAM | Unit | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 13 | Pembinaan dan pengawasann terhadap pelaksanaan kerjasama SPAM | Unit | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 14 | Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM | | 0% | 0 | 0 | 0% |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | SATUAN | CAPAIAN (%) | PAGU | REALISASI | PERSENTASE (%) |
|----|--|--|--------------|---|--------------|-------------|------|-----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 15 | Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan | Unit | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 16 | Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasanPerdesaan | Unit | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 17 | Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan | RumahTangga | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 18 | Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasanPerdesaan | Unit | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 19 | Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasanPerdesaan | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 20 | Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasanPerkotaan | Unit | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 21 | Perbaiki SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan | Unit | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Pengelolaan dan PengembanganS istem Air Limbah Domestik dalam Daerah | 1 | Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 2 | Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota | Dokumen | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 3 | Pembangunan/penyediaanSistemPengelolaa n Air Limbahterpusatskala Kota | Rumah Tangga | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 4 | Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota | Rumah Tangga | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 5 | Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman | Rumah Tangga | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 6 | Pembangunan/penyediaan sub system pengolahan setempat | RumahTangga | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 7 | Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik | Orang | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 8 | Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan SistemPengelolaan Air LimbahDomestik | | 0% | 0 | 0 | 0% |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | SATUAN | CAPAIAN (%) | PAGU | REALISASI | PERSENTASE (%) | |
|----|---------|----------|--------------|---|--------------|------|-----------|----------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | 9 | Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik | Unit | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 10 | Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 11 | Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 12 | Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman | Orang | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 13 | Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja | Unit | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 14 | Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja | Dokumen | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 15 | Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT | Rumah Tangga | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 16 | Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT | Rumah Tangga | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 17 | Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT | Dokumen | 0% | 0 | 0 | 0% |

Sumber : Pelaporan E-SPM Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.5 Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Bengkulu Tahun 2022

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | SATUAN | CAPAIAN (%) | PAGU | REALISASI | PERSENTASE (%) | |
|----|--------------------------------|---|--------------|--|-------------|---------|------------|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Program Pengembangan Perumahan | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 1 | Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota | Dokumen | 99,00 % | 6,490,600 | 6,425,600 | 99,00 % |
| | | | 2 | Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan | Dokumen | 99,53% | 33,571,025 | 33,412,424 | 99,53% |
| | | | 3 | Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani | Dokumen | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 4 | Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana | Dokumen | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 5 | Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota | Dokumen | 99,80% | 14,659,750 | 14,629,750 | 99,80% |
| | | | 6 | Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus | Dokumen | 82,26% | 8,497,200 | 6,990,000 | 82,26% |
| | | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 1 | Rehabilitasi rumah bagi korban bencana | Unit Rumah | 99,31 % | 73,229,150 | 72,726,550 | 99,31 % |
| | | | 2 | Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota | Dokumen | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 3 | Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana | Ha | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 4 | Pembangunan rumah bagi korban bencana | Unit Rumah | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 5 | Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota | Unit Rumah | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 6 | Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota | Unit Rumah | 0% | 0 | 0 | 0% |

Sumber : Pelaporan E-SPM Kabupaten Bengkulu Tahun 2022

2.2.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.6 Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | SATUAN | CAPAI AN (%) | PAGU | REALI SASI | PERSENTASE (%) | |
|----|--|--|--|---|--|--------------|------------|---------------|----------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah | 1 | Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalu ideteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan | Kasus | 0% | 50,000,000 | 0 | 0% | |
| | | | 2 | Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa | Kasus | 0% | 35,998,000 | 0 | 0% | |
| | | | 3 | Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota | Dokumen | 0% | 30,000,000 | 0 | 0% | |
| | | | 4 | Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum | Dokumen | 0% | 30,000,000 | 0 | 0% | |
| | | | 5 | Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | Orang | 0% | 30,000,000 | 0 | 0% | |
| | | | 6 | Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum | Dokumen | 0% | 50,000,000 | 0 | 0% | |
| | | | 7 | Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum | Unit | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| | | | 8 | Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | Dokumen | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| | | | 9 | Penyediaan layanan dalam rangka dampa kpenegakan Peraturan Daerah dan Perkada | Laporan | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| | | 1 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 1 | Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Laporan | 0% | 39,995,000 | 0 | 0% |
| | | | | 2 | Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Laporan | 0% | 30,000,000 | 0 | 0% |
| | | | | 3 | Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Laporan | 0% | 2,652,163,569 | 0 | 0% |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | SATUAN | CAPAIAN (%) | PAGU | REALISASI | PERSENTASE (%) | |
|----|--|--|---|--|---------|-------------|------------|------------|----------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten | 1 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Laporan | 0% | 43,316,000 | 0 | 0% | |
| 2 | Program Penanggulangan Bencana | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 1 | Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | | | | | |
| | | | 2 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenisbencana) | Orang | 82.23 % | 42,260,000 | 34,748,400 | 82.23 % | |
| | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiap siagaan Terhadap Bencana | 1 | Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | 2 | Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota | Orang | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | 3 | Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiap siagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | 4 | Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiap siagaan terhadap bencana | Unit | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | 5 | Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiap siagaan | Dokumen | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | 6 | Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiap siagaan bencana | Kawasan | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | 7 | Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | 8 | Pengembangan kapasitas Tim ReaksiCepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota | Orang | 52.79 % | 88,000,000 | 46,457,300 | 52.79 % | |
| | | | 9 | Penyusunan rencana kontijensi | Dokumen | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | 10 | Gladi kesiap siagaan terhadap bencana | Orang | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | 11 | Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana | Dokumen | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | | 12 | Pelatihan keluarga tanggap bencana alam | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 1 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas | Laporan | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | | Laporan | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| 3 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | | Laporan | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| 4 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | Orang | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| 5 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan DaruratBencana | | Laporan | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | | |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | SATUAN | CAPAIAN (%) | PAGU | REALISASI | PERSENTASE (%) |
|----|--|--|--------------|--|---------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 6 | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit | Laporan | 5.50 % | 32,699,800 | 1,800,000 | 5.50 % |
| | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 1 | Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 2 | Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | 0% | 31,440,000 | | 0% |
| | | | 3 | Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | 0% | 79,952,500 | | 0% |
| | | | 4 | Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | Dokumen | 0% | 25,900,000 | 12,242,500 | 0% |
| | | | 5 | Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana | Laporan | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 6 | Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | | 158,462,950 | 10,760,000 | 6,79% |
| 3 | Program Pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bah an Berbahaya dan Beracun Kebakar andalam Daerah Kabupaten/Kota | 1 | Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 2 | Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 31.37 % | 50,403,500 | 15,810,000 | 31.37 % |
| | | | 3 | Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran | Laporan | 20.39 % | 44,521,000 | 9,080,000 | 20.39 % |
| | | | 4 | Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 5 | Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Unit | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 6 | Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Dokumen | 0% | 44,397,000 | 0 | 0% |
| | | | 7 | Pembinaan paratur pemadam kebakaran | Dokumen | | | | |
| | | | 8 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) | Unit | 0% | 0 | 0 | 0% |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | SATUAN | CAPAI AN (%) | PAGU | REALI SASI | PERSENTASE (%) |
|----|---------|--|--------------|--|---------|--------------|------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 9 | Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran | Orang | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 10 | Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga | Dokumen | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | 1 | Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran | Laporan | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 2 | Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran | Laporan | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | InvestigasiKejadi anKebakaran | 1 | Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran | Dokumen | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dalamPencegaha nKebakaran | 1 | Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat | Orang | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 2 | Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran | | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 3 | Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana | Dokumen | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap KondisiMembahayakan Manusia | 1 | Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia | Laporan | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 1 | Standar isasisarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi | Dokumen | 0% | 0 | 0 | 0% |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | SATUAN | CAPAIAN (%) | PAGU | REALISASI | PERSENTASE (%) |
|----|---------|----------|--------------|--|---------|-------------|------|-----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 2 | Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayaka nmanusia/penyelamatan dan evakuasi | Unit | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 3 | Pembinaan aparaturn pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayaka nmanusia/penyelamatan dan evakuasi | Laporan | 0% | 0 | 0 | 0% |

Sumber : Pelaporan E-SPM Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

2.2.6. Bidang Sosial

Tabel 2.7 Kondisi capaian SPM bidang Sosial di Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | SATUAN | CAPAIAN (%) | PAGU | REALISASI | PERSENTASE (%) |
|----|-----------------------------|--|--------------|--|--------|-------------|------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 1 | Penyediaan permakanaan | Orang | 98,47% | 22,962,400 | 22,540,500 | 98,47% |
| | | | 2 | Penyediaan sandang | Orang | 97,47% | 22,500,000 | 21,929,900 | 97,47% |
| | | | 3 | Penyediaan ala tbantu | Orang | 99,00% | 30,000,000 | 29,698,950 | 99,00% |
| | | | 4 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 99,17% | 10,840,000 | 10,749,800 | 99,17% |
| | | | 5 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial | Orang | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 6 | Pemberian bimbingan social kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjutusiater lantar, sertage landangan pengemis dan masyarakat | Orang | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 7 | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Orang | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 8 | Pemberi anak seske layanan pendidikan dan kesehatan dasar | Orang | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 9 | Pemberian layanan data dan pengaduan | Orang | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | 10 | Pemberian layanan kedaruratan | Orang | 95,21% | 28,381,000 | 27,021,550 | 95,21% |
| | | | 11 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | Orang | 99,96% | 12,037,600 | 12,032,300 | 99,96% |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | | SATUAN | CAPAIAN (%) | PAGU | REALISASI | PERSENTASE (%) |
|----|---------|---|--------------|---|---------|-------------|------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 12 | Pemberian layanan rujukan | Dokumen | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | 1 | Penyediaan makanan | Orang | 99,99% | 34,807,000 | 34,804,500 | 99,99% |
| | | | 2 | Penyediaan sandang | Orang | 99,98% | 13,131,750 | 13,129,450 | 99,98% |
| | | | 3 | Penyediaan tempat penampungan pengungsi | Unit | 87,65% | 9,720,000 | 8,520,000 | 87,65% |
| | | | 4 | Penanganan khusus bagi kelompok rentan | Orang | 100% | 60,813,000 | 60,812,329 | 100% |
| | | | 5 | Pelayanan dukungan Psikososial | Orang | 0% | 0 | 0 | 0% |

Sumber: Pelaporan E-SPM Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Bengkayang ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

2.2.1. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Kabupaten Bengkayang secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

- Adanya pergantian personil yang menangani pendataan
- Kurang validnya data yang tersedia
- Data yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan penerapan SPM

2. Penghitungan Kebutuhan

Bahwa ada beberapa penghitungan kebutuhan yang tidak berdasarkan analisis kebutuhan

3. Perencanaan dan Penganggaran

Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan program SPM

4. Pelaksanaan

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Penerapan SPM pada urusan Pendidikan.

2.2.2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

| NO | Jenis Pelayanan | Permasalahan |
|----|-------------------------------|--|
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | a. Kurangnya informasi dari tenaga kesehatan kepada masyarakat terutama ibu hamil dan keluarga b. Kurangnya pengetahuan ibu hamil dan masyarakat serta belum memahami sepenuhnya mengenai |

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| | | <p>bahaya-bahaya pada masa kehamilan sehingga ibu hamil menganggap tidak perlu datang ke fasyankes untuk melakukan pemeriksaan apabila tidak ada keluhan dalam kehamilan</p> <p>c. Puskesmas dan desa belum optimal dalam menyediakan sarana dan prasarana yaitu kurang tenaga bidan yang tinggal di desa dan poskesdes</p> <p>d. Jarak tempuh Fasyankes yang jauh dari tempat tinggal ibu hamil</p> <p>e. Kerjasama Lintas Sektor antara Puskesmas dengan pihak terkait belum optimal terjadi antar puskesmas di wilayah kerjanya.</p> |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | <p>a. Pustu dan Poskesdes tidak memenuhi standar persalinan fasyankes.</p> <p>b. Kerjasama lintas sektor yang masih kurang optimal dalam mempromosikan persalinan lebih aman di fasyankes.</p> <p>c. Pertolongan persalinan masih banyak di tolong oleh dukun bayi di rumah dan tidak ada kunjungan oleh tenaga kesehatan.</p> <p>d. Letak geografis yang sulit</p> |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | <p>a. Kerja sama lintas sektor yang masih kurang optimal, kurangnya dukungan desa dalam memotivasi ibu dan keluarga agar membawa anaknya untuk kunjungan neonatus sampai selesai.</p> <p>b. Letak geografis yang sulit</p> |

| | | |
|---|--|--|
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | <ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga dalam pemenuhan hak anak balita yang harus di terimanya sehingga tidak lagi datang keposyandu untuk di timbang dan lainnya. b. Kurangnya kemampuan pengelola program dalam memahami indikator dalam pencapaian kunjungan balita. c. Kerjasama lintas sektor yang masih kurang optimal. d. Letak geografis yang sulit |
| 5 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian Laporan belum tertib / tepat waktu b. Beberapa Petugas Puskesmas belum memahami tata cara pencatatan dan pelaporan. c. Pergantian Pengelola Program di Puskesmas setiap tahun. d. Beberapa Pengelola Program Kesehatan Usia Sekolah Dasar di Puskesmas masih belum mendapatkan pelatihan Upaya Kesehatan Sekolah e. Kerjasama Lintas Sektor masih belum berjalan maksimal dalam pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dasar f. Belum seluruh sekolah melaksanakan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) sesuai standar. g. Keterbatasan tenaga kesehatan dan anggaran dalam pelaksanaan penjaringan usia Pendidikan Dasar. |

| | | |
|---|---|--|
| 6 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | <ul style="list-style-type: none"> a. Kader posbindu PTM belum semua terlatih; b. Belum semua desa mempunyai posbindu PTM; c. Masyarakat kurang berminat memeriksakan diri ke Posbindu karena di Posbindu tidak ada pengobatan; d. Masyarakat belum sadar pentingnya deteksi dini Penyakit Tidak Menular; e. Pemerintah desa belum optimal mendukung kegiatan posbindu; f. Belum adanya Inovasi pada kegiatan Posbindu PTM untuk menarik minat Masyarakat khususnya Usia Produktif g. Ada beberapa pengelola program setiap tahun berganti. |
| 7 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian Laporan belum tertib / tepat waktu b. Beberapa Petugas Puskesmas belum memahami tata cara pencatatan dan pelaporan. c. Pergantian Pengelola Program di Puskesmas setiap Tahun berubah. d. Beberapa Pengelola Program Kesehatan Lansia di Puskesmas masih belum mendapatkan pelatihan Kesehatan Lansia e. Kerjasama Lintas Sektor masih belum berjalan maksimal dalam pelayanan Kesehatan Lansia f. Belum tercovernya Posyandu Lansia di setiap desa |

| | | |
|----|--|--|
| | | g. Kader Posyandu Lansia belum terlatih |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | <p>a. Penderita hipertensi tidak rutin datang ke Puskesmas untuk mengambil obat</p> <p>b. Kesadaran penderita hipertensi untuk datang ke Puskesmas masih rendah</p> <p>c. Keterbatasan petugas untuk melakukan kunjungan rumah kepada penderita hipertensi</p> |
| 9 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) | <p>a. Penderita Diabetes Melitus (DM) tidak rutin datang ke Puskesmas untuk mengambil obat.</p> <p>b. Kesadaran penderita Diabetes Melitus (DM) untuk datang ke Puskesmas masih rendah.</p> <p>c. Keterbatasan petugas untuk melakukan kunjungan rumah.</p> |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB) | <p>a. Penyampaian laporan belum tertib dan tepat waktu.</p> <p>b. Beberapa petugas puskesmas kurang memahami definisi operasional dalam pencatatan dan pelaporan.</p> <p>c. Pergantian pengelola program Kesehatan jiwa di puskesmas setiap tahun.</p> <p>d. Pengelola program dan petugas pelaksana Kesehatan Jiwa di puskesmas belum semua mendapatkan pelatihan Kesehatan Jiwa.</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | | e. Kerjasama lintas sektor masih belum berjalan maksimal dalam penanganan kasus ODGJ. |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis (TB) | <p>a. Masih banyak pengelola program belum mengentry data di Aplikasi Online SITB.</p> <p>b. Pengelola program setiap tahunnya selalu berganti-ganti.</p> <p>c. Kurangnya kemampuan tenaga kesehatan dalam melakukan pelacakan orang terduga Tuberkolosis (TB).</p> <p>d. Belum optimalnya kerjasama Lintas Sektor dalam pelaporan dan pencatatan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkolosis (TB).</p> <p>e. Belum adanya ruangan isolasi/pelayanan khusus untuk penderita Penyakit Menular.</p> |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV | <p>a. Masih banyak pengelola program belum mengentry di aplikasi SIHA 2.1</p> <p>b. Pengelola program setiap tahunnya selalu berganti-ganti.</p> <p>c. Belum optimalnya kerjasama Lintas Sektor dalam pelaporan dan pencatatan pelayanan kesehatan orang dengan Resiko Terinfeksi HIV.</p> <p>d. Belum adanya ruangan isolasi/pelayanan khusus untuk penderita Penyakit Menular.</p> |

2.2.3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Bengkayang secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat

berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut, Adapun permasalahan dalam penerapan SPM Pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

2. Pengumpulan Data

- Beberapa Kecamatan tidak memiliki sumber air baku yang layak
- Strategi sanitasi Kabupaten (SSK) tahun 2017 sudah tidak relevan terhadap kondisi yang berkembang dan revisi SSK dalam proses

3. Penghitungan Kebutuhan

Sumber air baku yang ada cukup jauh dari permukiman sehingga membutuhkan dana yang cukup besar untuk penyediaan SPAM

4. Perencanaan dan Penganggaran

Keterbatasan Pembiayaan dalam pengelolaan air bersih

5. Pelaksanaan

Belum ada mekanisme pemantauan berkala dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan kegiatan komunikasi sektor sanitasi terutama sub sektor air limbah di tingkat individu dan masyarakat.

6. Lain lain

- Belum dimilikinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Bengkayang menyulitkan masyarakat yang hendak membuang lumpur hasil pengurasan septi tank
- Belum adanya regulasi atau Perda Air Limbah Domestik skala Kabupaten
- Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah permukiman
- Masih kurangnya akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah permukiman

2.2.4. **Perumahan Rakyat**

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Bengkayang secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Keterbatasan anggaran untuk mengumpulkan data se-kabupaten Bengkayang

2. Penghitungan Kebutuhan

Belum terkumpulnya data secara menyeluruh dan tingkat keakuratan data sehingga menyulitkan untuk menghitung kebutuhan

3. Perencanaan dan Penganggaran

Masih terbatasnya koordinasi antar pemangku kebijakan dalam hal perencanaan dan penganggaran SPM Bidang Perumahan

4. Pelaksanaan

Terbatasnya anggaran dan personil bidang perumahan

5. Lain lain

Perlu penguatan koordinasi dalam hal perencanaan dan penganggaran

2.2.5. **Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Bengkayang secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

A. Satuan Polisi Pamong Praja

1. Permasalahan

- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
- Terbatasnya anggota yang bersertifikat PPNS
- Wilayah Patroli yang luas dengan kondisi jalan yang kurang memadai
- Adanya usaha ekonomi yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum
- Kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan perda dan perkada
- Kurangnya dukungan operasional penegakan Perda
- Kurangnya anggaran untuk meunjang berbagai program dan kegiatan di Satpol PP.
- Belum optimalnya kerjasama antar pemangku kepentingan dan lintas sektoral dalam rangka penegakan Perda/Perkada.

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Permasalahan

- Dalam melaksanakan tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah selalu mengalami hambatan-hambatan dilapangan, faktor utamanya adalah keterbatasan anggaran dan personil
- Pelaksanaan anggaran TAPD pada bidang-bidang tidak dapat dilaksanakan

- Masih minimnya sarana dan prasarana fasilitas komunikasi dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana, baik secara personil maupun sumber daya manusia.
- Letak Geografis Kabupaten Bengkayang terdapat daerah perbukitan dan lembah, sehingga hal tersebut merupakan factor utama hambatan-hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal dan jangkauan sangat terbatas sehingga untuk mencapai target sasaran menjadi terkendala

2.2.6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kabupaten Bengkayang berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

Adapun permasalahan dalam penerapan SPM Pada Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data
Desa/Kelurahan belum menyampaikan data PMKS sebagaimana surat yang disampaikan oleh DSP3A Kab. Bengkayang
- b. Penghitungan Kebutuhan
Terbatasnya data menyebabkan penghitungan kebutuhan belum maksimal
- c. Perencanaan dan Penganggaran
Anggaran yang tersedia bersifat gelondongan dan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan PMKS karena harus menyiapkan alokasi anggaran untuk kegiatan lainnya pada bidang perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial
- d. Pelaksanaan
Anggaran yang terbatas diprioritaskan untuk pengalokasian anggaran bagi lansia terlantar, disabilitas terlantar dan orang/anak terlantar yang merupakan warga bengkayang dan sifatnya urgent dan mendesak, sedangkan untuk gelandangan dan pengemis belum dapat dipenuhi
- e. Lain- lain
Tid

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Bengkayang memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

3.1.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bengkayang Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -12 tahun untuk sekolah di SD/MI melalui pendataan kepada penduduk usia 7 – 12 yang belum bersekolah di SD; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SD/MI.
- b. Peningkatan partisipasi penduduk usia 13 -15 tahun untuk sekolah di SMP/MTs melalui pendataan kepada penduduk usia 13 – 15 yang belum bersekolah di SMP/MTs; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SMP/MTs dan pemberian motivasi kepada anak usia 13 – 15 tentang pentingnya pendidikan.
- c. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -18 tahun untuk mengikuti pendidikan kesetaraan melalui insentif kepada penduduk yang bersedia mengikuti pendidikan kesetaraan; perbaikan kondisi PKBM; peningkatan kualitas kurikulum terutama yang berkaitan dengan life-skill.
- d. Peningkatan Rerata kemampuan Literasi SD dan SMP berdasarkan Asesmen Nasional ;

- e. Peningkatan Rerata kemampuan Numerasi SD dan SMP berdasarkan asesmen nasional;
- f. Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B;
- g. Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1;
- h. Peningkatan Indeks Iklim Keamanan SD dan SMP ;
- i. Peningkatan Indeks Iklim Kebinekaan SD dan SMP;
- j. Peningkatan Indeks Inklusivitas SD dan SMP
- k. Peningkatan Pemenuhan Standar sarana dan prasarana pada satuan pendidikan PAUD, PNF, SD, SMP melalui perencanaan dan tahapan yang baik sesuai dengan kemampuan daerah.

3.1.2.SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;
- b. Peningkatan kapasitas kader;
- c. Peningkatan kapasitas pengelola UKS dan dokter kecil;
- d. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan;
- e. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan;
- f. Melakukan koordinasi mengenai SPM urusan Kesehatan dengan melibatkan Puskesmas, Klinik Pratama, Rumah Sakit Daerah dan swasta;
- g. Penyusunan sistem pelaporan SPM yang terintegrasi;
- h. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara rutin

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang kesehatan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pemeriksaan ibu hamil yang melahirkan pada akhir tahun;
- b. Peningkatan kesehatan ibu bersalin diutamakan ibu bersalin resiko tinggi di 2 minggu setelah persalinan;
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir diutamakan pada bayi dengan berat badan lahir rendah;
- d. Peningkatan pelayanan kesehatan balita diutamakan pada usia dua tahun dalam rangka pencegahan stunting dan penguatan tumbuh kembang;

- e. Pemeriksaan kesehatan pada pendidikan dasar diutamakan pada pemeriksaan kesehatan secara rutin dan peningkatan peran UKS;
- f. Peningkatan kesehatan pada usia produktif difokuskan pada pemeriksaan penyakit tidak menular;
- g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut diutamakan pada peningkatan kesehatan lansia;
- h. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi di utamakan pada peningkatan Posbindu PTM;
- i. Pengelolaan pelayanan diabetes mellitus difokuskan pada pencegahan dan peningkatan pemahaman masyarakat sejak dini;
- j. Pengelolaan pelayanan kesehatan ODGJ dapat diutamakan pada peningkatan kunjungan rumah;
- k. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB) dapat diutamakan pada pelacakan kasus penyakit menular;
- l. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi HIV dapat diutamakan dengan pelacakan kasus penyakit menular.

3.1.3.SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Isu Strategis dari SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan masalah isu stategis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum melalui pembangunan, peningkatan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan perdesaan; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM; Pengembangan SDM dan Kelembagaan; Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan; dan pengelolaan database air minum yang terupdate;
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air limbah domestik melalui Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan

Air Limbah Domestik; Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan pengelolaan data base air limbah domestik yang terupdate.

Adapun arah kebijakannya adalah peningkatan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi dengan fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Air Limbah Domestik.

3.1.4.SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Dalam melaksanakan amanah Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Bengkayang memiliki faktor- faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencarierial ternatifter baik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Tantangan dalam pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Sebanyak 17 kecamatan di Kabupaten Bengkayang berpotensi terkena bencana alam, yaitu Banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan.
- b. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan;
- c. Keterbatasan anggaran daerah untuk menyelesaikan rumah korban bencana dan rumah terkenda dampak program pemerintah dalam satu waktu;

Adapun arah kebijakan penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Program rencana pengembangan perumahan rakyat
- b. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Peluang yang dapat diambil dalam mendukung pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan anggaran bantuan keuangan Kabupaten dan DAK untuk penanganan rumah korban bencana dan rumah terkenda dampak program pemerintah di daerah;

- b. Keberadaan pihak swasta/ pengembang yang berperan serta dalam penyediaan/ pemenuhan perumahan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah.

Sementara itu, dengan melihat peluang dan tantangan yang ada maka strategi yang ditempuh dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah melalui pembangunan hunian tetap, pemberian bantuan rehab rumah, rehabilitasi rumah dan relokasi. Kebijakan di fokuskan pada pembangunan hunian tetap untuk masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan golongan rentan.

3.1.5.SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan strategis yang dihadapi dalam pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM, permasalahan yang dihadapi pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi sebagai berikut:

- a. Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan cedera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat penegakan perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya.
- b. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada.
- c. Belum terpenuhinya standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat mengenai penegakan Perda/perkada

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bengkayang Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat adalah:

- a. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat:
 - 1) Mengendalikan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
 - 2) Meningkatkan pengamanan event kegiatan dan aktivitas yang melibatkan masyarakat luas
- b. Peningkatan perlindungan kepada masyarakat:
 - 1) Meningkatkan pemberdayaan petugas perlindungan masyarakat melalui pembinaan, pembekalan, pelatihan kesamaptaan, dan pelatihan dasar rescue linmas

- 2) Operasional piket pengamanan wilayah oleh petugas linmas
 - 3) Menyelenggarakan Sistem Operasi Siaga 24 Jam (SOS 24)
- c. Penegakan peraturan perundangan:
- 1) Mengoptimalkan operasi penertiban umum
 - 2) Menegakkan produk hukum daerah
 - 3) Mengoptimalkan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) secara yustisi dan non yustisi
- d. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Permasalahan strategis pelayanan kebencanaan di Kabupaten Bengkayang adalah luasnya kawasan rawan bencana yang ada. Hal tersebut berdampak pada banyaknya warga/penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana. Pencapaian standar pelayanan minimal di bidang kebencanaan mensyaratkan tersedianya data jumlah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut. Dengan asumsi 17 kecamatan di Kabupaten Bengkayang masuk dalam kawasan rawan bencana, maka seluruh penduduk di 17 kecamatan tersebut juga bertempat tinggal di kawasan rawan bencana.

Berdasarkan masalah strategis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan melalui penyediaan payung hukum penanganan bencana, dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan yang berkualitas dengan memanfaatkan media yang tepat.
- 2) Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui penyediaan SDM yang handal dan koordinasi yang cepat dan tepat.

Adapun arah kebijakan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah:

- 1) Pemanfaatan media berbasis teknologi dan informasi serta media massa untuk penyebar luasan informasi kebencanaan.
- 2) Penguatan sistem koordinasi penanggulangan bencana daerah.
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Penanggulangan kebakaran harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam

memenuhi semua kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Permasalahan pokok yang dihadapi pemadam kebakara nadalah minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk menunjang tercapainya response time 15 menit.

Upaya yang bias dilakukan oleh pemadam kebakaran dalam meningkatkan respon time yaitu dengan menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, yang berisi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan respon time. Strategi dan Kebijakan yang akan dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan pokok tersebut yaitu meningkatkan respon time dalam pelayanan pemadaman kebakaran dengan kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

3.1.6.SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Isu strategis dalam pemenuhan SPM Sosial di Kabupaten Bengkayang adalah masih tingginya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), masih tingginya angka anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis, serta meningkatnya angka penduduk miskin sebagai dampak pasca COVID-19, kurangnya pemberdayaan PPKS, koordinasi antara perangkat daerah belum berjalan secara optimal, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terbatasnya jumlah aparatur dinas sosial dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi pelayanan perangkat daerah, minimnya pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan rehabilitasi sosial, belum optimalnya cakupan layanan rehabilitasi sosial pada Warga Negara penyandang disabilitas terlantar, anak telantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti sosial serta belum optimalnya layanan perlindungan dan jaminan social pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban yang terdampak bencana. Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bengkayang Bidang Sosial adalah meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial dan korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan, dengan fokus kebijakan pada:

- a. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas aparatur serta sarana dan prasarana guna mewujudkan birokrasi yang profesional;
- b. Menjalinkan Kerjasama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkayang agar dana CSR perusahaan dapat mendukung pengentasan kemiskinan;
- c. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan stakeholders terkait untuk mengembangkan pola pemberdayaan yang sesuai dengan kearifan lokal serta melaksanakan pemberdayaan kepada individu, keluarga dan komunitas;
- d. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PPKS;
- e. Pencatatan dan pengelolaan data PPKS secara menyeluruh dan terpadu.

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bengkayang Bidang Sosial adalah:

- a. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan di Kabupaten Bengkayang guna mempercepat kesejahteraan sosial secara mandiri dan sinergis;
- b. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal di Kabupaten Bengkayang;
- c. Mengoptimalkan pemberdayaan individu, keluarga, dan komunitas melalui berbagai pendidikan, pelatihan, pembinaan dan bantuan sosial;
- d. Meningkatkan tata kelola lembaga pemerintahan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur;
- e. kualitas data dan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja;
- f. Meningkatkan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang tepat sasaran;
- g. Peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial kepada individu, kelompok dan keluarga tidak mampu yang memerlukan layanan kesejahteraan sosial.

3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

3.2.1 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bengkayang

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Satuan | Tahun Dasar (N) | Pencapaian SPM 2023 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Pencapaian SPM 2024 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|---|--------|-----------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|----------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|----------|------------------|--------------------|
| | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 |
| 1) | Pendidikan Dasar Usia Dini | | | 15280 | 3942 | | | | | | | 15280 | 3942 | | | | | | |
| 1 | Angka partisipasi sekolah | % | 2022 | | | 64,20 | 64,20 | 936.116.982 | | APBD | DISDIKBUD | | | 100 | 100 | 1.029.728.680 | | APBD | DISDIKBUD |
| 2 | Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B | % | 2022 | | | 29,08 | 29,08 | 2.033.095.200 | | APBD | DISDIKBUD | | | 29,14 | 29,14 | 2.236.404.720 | | APBD | DISDIKBUD |
| 3 | Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV | % | 2022 | | | 75,34 | 75,34 | 56.961.000 | | APBD | DISDIKBUD | | | 76,44 | 76,44 | 62.657.100 | | APBD | DISDIKBUD |
| 4 | Rasio pengawas sekolah untuk PAUD | % | 2022 | | | 2 | 2 | - | | APBD | DISDIKBUD | | | 5 | 5 | 45.758.900 | | APBD | DISDIKBUD |
| 5 | Kecukupan formasi guru ASN | % | 2022 | | | 51 | 51 | - | | APBD | DISDIKBUD | | | 71 | 71 | 45.890.750 | | APBD | DISDIKBUD |
| 6 | Indeks distribusi guru | % | 2022 | | | 57 | 57 | 23.935.850 | | APBD | DISDIKBUD | | | 77 | 77 | 26.329.435 | | APBD | DISDIKBUD |
| 7 | Proporsi PTK bersertifikat | % | 2022 | | | 51 | 51 | - | | APBD | DISDIKBUD | | | 71 | 71 | 55.320.000 | | APBD | DISDIKBUD |
| 8 | Proporsi PTK penggerak | % | 2022 | | | 51 | 51 | 28.364.250 | | APBD | DISDIKBUD | | | 71 | 71 | 31.200.675 | | APBD | DISDIKBUD |
| 9 | Pengalaman pelatihan guru | % | 2022 | | | 51 | 51 | - | | APBD | DISDIKBUD | | | 71 | 71 | 65.750.000 | | APBD | DISDIKBUD |
| 2) | Pendidikan Dasar SD | % | | 33272 | 32493 | | | | | APBD | | 33272 | 32493 | | | | | | |
| 1 | Angka partisipasi kasar | % | 2022 | | | 99,75 | 99,75 | - | | APBD | DISDIKBUD | | | 100 | 100 | 50.754.000 | | APBD | DISDIKBUD |
| 2 | Angka partisipasi sekolah | % | 2022 | | | 99,20 | 99,20 | 694.317.600 | | APBD | DISDIKBUD | | | 100 | 100 | 763.749.360 | | APBD | DISDIKBUD |
| 3 | Angka partisipasi murni | % | 2022 | | | 96,75 | 96,75 | 0 | | APBD | DISDIKBUD | | | 100 | 100 | 125.750.000 | | APBD | DISDIKBUD |
| 4 | Kemampuan literasi | Nilai | 2022 | | | 39,66 | 39,66 | 0 | | APBD | DISDIKBUD | | | 47,67 | 47,67 | 135.653.000 | | APBD | DISDIKBUD |
| 5 | Kemampuan numerasi | Nilai | 2022 | | | 29,09 | 29,09 | 0 | | APBD | DISDIKBUD | | | 35,90 | 35,90 | 145.750.000 | | APBD | DISDIKBUD |
| 6 | Perbedaan Skor Literasi | Nilai | 2022 | | | - | - | - | | APBD | DISDIKBUD | | | - | - | 150.450.000 | | APBD | DISDIKBUD |
| 7 | Perbedaan Skor numerasi | Nilai | 2022 | | | - | - | - | | APBD | DISDIKBUD | | | - | - | 45.750.000 | | APBD | DISDIKBUD |
| 8 | Indeks iklim keamanan | Nilai | 2022 | | | 63,52 | 63,52 | 7.780.000 | | APBD | DISDIKBUD | | | 84,81 | 84,81 | 23.340.000 | | APBD | DISDIKBUD |
| 9 | Indeks iklim kebinekaan | % | 2022 | | | 66,54 | 66,54 | 7.780.000 | | APBD | DISDIKBUD | | | 83,10 | 83,10 | 8.558.000 | | APBD | DISDIKBUD |
| 10 | Indeks iklim inklusivitas | % | 2022 | | | 52,90 | 52,90 | 7.780.000 | | APBD | DISDIKBUD | | | 73,57 | 73,57 | 8.558.000 | | APBD | DISDIKBUD |
| 11 | Kecukupan formasi guru ASN | % | 2022 | | | 19,00 | 19,00 | 1.944.136.556 | | APBD | DISDIKBUD | | | 119 | 119 | 2.138.550.212 | | APBD | DISDIKBUD |
| 12 | Indeks distribusi guru | % | 2022 | | | 0,37 | 0,37 | 23.935.850 | | APBD | DISDIKBUD | | | 100 | 100 | 26.329.435 | | APBD | DISDIKBUD |
| 13 | Proporsi PTK bersertifikat | % | 2022 | | | 81,6 | 81,6 | 101.156.000 | | APBD | DISDIKBUD | | | 163 | 182 | 111.271.600 | | APBD | DISDIKBUD |
| 14 | Proporsi PTK penggerak | % | 2022 | | | 0 | 0 | 28.364.250 | | APBD | DISDIKBUD | | | 100 | 100 | 31.200.675 | | APBD | DISDIKBUD |
| 15 | Pengalaman pelatihan guru | % | 2022 | | | 40,20 | 40,20 | 0 | | APBD | DISDIKBUD | | | 140 | 140 | 76.550.000 | | APBD | DISDIKBUD |
| 3) | Pendidikan Dasar SMP | | | 16234 | 13944 | | | | | APBD | | 16234 | 13944 | | | | | | |
| 1 | Angka partisipasi kasar | % | 2022 | | | 94,52 | 94,52 | - | | APBD | DISDIKBUD | | | 100 | 100 | 80.755.000 | | APBD | DISDIKBUD |
| 2 | Angka partisipasi sekolah | % | 2022 | | | 96,17 | 96,17 | 1.417.720.402 | | APBD | DISDIKBUD | | | 100 | 100 | 1.559.492.442 | | APBD | DISDIKBUD |
| 3 | Angka partisipasi murni | % | 2022 | | | 62,80 | 62,80 | - | | APBD | DISDIKBUD | | | 94,20 | 94,20 | 750.575.000 | | APBD | DISDIKBUD |
| 4 | Kemampuan literasi | Nilai | 2022 | | | 47,03 | 47,03 | - | | APBD | DISDIKBUD | | | 62,80 | 62,80 | 65.350.000 | | APBD | DISDIKBUD |
| 5 | Kemampuan numerasi | Nilai | 2022 | | | 28,35 | 28,35 | - | | APBD | DISDIKBUD | | | 54,27 | 54,27 | 95.790.000 | | APBD | DISDIKBUD |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|-------|------|--|-----|-------|-------|---------------|--|------|-----------|--|-----|-------|-------|---------------|--|------|-----------|
| 6 | Perbedaan skor literasi | Nilai | 2022 | | | 0 | 0 | - | | APBD | DISDIKBUD | | | - | - | 250.357.000 | | APBD | DISDIKBUD |
| 7 | Perbedaan skor numerasi | Nilai | 2022 | | | 0 | 0 | - | | APBD | DISDIKBUD | | | - | - | 125.540.000 | | APBD | DISDIKBUD |
| 8 | Indeks iklim keamanan | Nilai | 2022 | | | 64,60 | 64,60 | 301.186.833 | | APBD | DISDIKBUD | | | 84,81 | 84,81 | 331.305.516 | | APBD | DISDIKBUD |
| 9 | Indeks iklim kebinekaan | % | 2022 | | | 66,85 | 66,85 | 301.186.833 | | APBD | DISDIKBUD | | | 78,77 | 78,77 | 331.305.516 | | APBD | DISDIKBUD |
| 10 | Indeks iklim inklusivitas | % | 2022 | | | 54,80 | 54,80 | 301.186.833 | | APBD | DISDIKBUD | | | 77,66 | 77,66 | 331.305.516 | | APBD | DISDIKBUD |
| 11 | Kecukupan formasi guru ASN | % | 2022 | | | 16,00 | 16,00 | 7.754.692.662 | | APBD | DISDIKBUD | | | 66 | 66 | 8.530.161.928 | | APBD | DISDIKBUD |
| 12 | Indeks distribusi guru | % | 2022 | | | 0,29 | 0,29 | 23.935.850 | | APBD | DISDIKBUD | | | 50 | 50 | 26.329.435 | | APBD | DISDIKBUD |
| 13 | Proporsi PTK bersertifikat | % | 2022 | | | 92,25 | 92,25 | 89.352.750 | | APBD | DISDIKBUD | | | 142 | 142 | 98.288.025 | | APBD | DISDIKBUD |
| 14 | Proporsi PTK penggerak | % | 2022 | | | 0,03 | 0,03 | 28.364.250 | | APBD | DISDIKBUD | | | 50 | 50 | 31.200.675 | | APBD | DISDIKBUD |
| 15 | Pengalaman pelatihan guru | % | 2022 | | | 75,50 | 75,50 | - | | APBD | DISDIKBUD | | | 126 | 126 | 45.500.000 | | APBD | DISDIKBUD |
| 4) | Pendidikan Kesetaraan | | | | 964 | 964 | | | | APBD | | | 964 | 964 | | | | | |
| 1 | Angka partisipasi kasar | % | 2022 | | | 0 | 0 | - | | APBD | DISDIKBUD | | | - | - | 152.500.000 | | | DISDIKBUD |
| 2 | Angka partisipasi sekolah | % | 2022 | | | 4,23 | 4,23 | 404.293.000 | | APBD | DISDIKBUD | | | 100 | 100 | 444.722.300 | | | DISDIKBUD |
| 3 | Angka partisipasi murni | % | 2022 | | | 96,75 | 96,75 | - | | APBD | DISDIKBUD | | | 145 | 145 | 250.780.000 | | | DISDIKBUD |
| 4 | Kemampuan literasi | Nilai | 2022 | | | 57,76 | 57,76 | - | | APBD | DISDIKBUD | | | 62,80 | 62,80 | 55.450.000 | | APBD | DISDIKBUD |
| 5 | Kemampuan numerasi | Nilai | 2022 | | | 52,29 | 52,29 | - | | APBD | DISDIKBUD | | | 54,27 | 54,27 | 45.780.000 | | APBD | DISDIKBUD |
| 6 | Perbedaan skor literasi | Nilai | 2022 | | | 0 | 0 | - | | APBD | DISDIKBUD | | | - | - | 55.230.000 | | | DISDIKBUD |
| 7 | Perbedaan skor numerasi | Nilai | 2022 | | | 0 | 0 | - | | APBD | DISDIKBUD | | | - | - | 235.760.000 | | | DISDIKBUD |
| 8 | Indeks iklim keamanan | Nilai | 2022 | | | 78,73 | 78,73 | - | | APBD | DISDIKBUD | | | 80,98 | 80,98 | 250.230.000 | | | DISDIKBUD |
| 9 | Indeks iklim kebinekaan | % | 2022 | | | 76,56 | 76,56 | - | | APBD | DISDIKBUD | | | 78,77 | 78,77 | 135.540.000 | | APBD | DISDIKBUD |
| 10 | Indeks iklim inklusivitas | % | 2022 | | | 74,56 | 74,56 | - | | APBD | DISDIKBUD | | | 77,66 | 77,66 | 125.600.000 | | APBD | DISDIKBUD |
| 11 | Kecukupan formasi guru ASN | % | 2022 | | | 21 | 21 | - | | APBD | DISDIKBUD | | | 31 | 31 | 85.730.000 | | | DISDIKBUD |
| 12 | Indeks distribusi guru | % | 2022 | | | 21 | 21 | 23.935.850 | | APBD | DISDIKBUD | | | 31 | 31 | 26.329.435 | | | DISDIKBUD |
| 13 | Proporsi PTK bersertifikat | % | 2022 | | | 0 | 0 | - | | APBD | DISDIKBUD | | | 50 | - | 75.643.000 | | APBD | DISDIKBUD |
| 14 | Proporsi PTK penggerak | % | 2022 | | | 0 | 0 | 28.364.250 | | APBD | DISDIKBUD | | | 50 | - | 31.200.675 | | APBD | DISDIKBUD |
| 15 | Pengalaman pelatihan guru | % | 2022 | | | 76 | 76 | - | | APBD | DISDIKBUD | | | 81 | 81 | 250.700.000 | | APBD | DISDIKBUD |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Satuan | Tahun Dasar (N) | Pencapaian SPM 2025 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Pencapaian SPM 2026 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Pencapaian SPM 2027 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|---|--------|-----------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|----------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|----------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|----------|------------------|--------------------|
| | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 1) | Pendidikan Dasar Usia Dini | | | 15280 | 3942 | | | | | | | 15280 | 3942 | | | | | | | 15280 | 3942 | | | | | | |
| 1 | Angka partisipasi sekolah | % | 2022 | | | 100 | 100 | 1.132.701.548 | | APBD | DISDIKBUD | | | 100 | 100 | 1.245.971.703 | | APBD | DISDIKBUD | | | 100 | 100 | 1.370.568.873 | | APBD | DISDIKBUD |
| 2 | Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B | % | 2022 | | | 29,17 | 29,17 | 2.460.045.192 | | APBD | DISDIKBUD | | | 29,20 | 29,20 | 2.706.049.711 | | APBD | DISDIKBUD | | | 29,23 | 29,23 | 2.976.654.682 | | APBD | DISDIKBUD |
| 3 | Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV | % | 2022 | | | 77,49 | 77,49 | 68.922.810 | | APBD | DISDIKBUD | | | 78,54 | 78,54 | 75.815.091 | | APBD | DISDIKBUD | | | 79,59 | 79,59 | 83.396.600 | | APBD | DISDIKBUD |
| 4 | Rasio pengawas sekolah untuk PAUD | % | 2022 | | | 10 | 10 | 50.334.790 | | APBD | DISDIKBUD | | | 15 | 15 | 55.368.269 | | APBD | DISDIKBUD | | | 20 | 20 | 60.905.096 | | APBD | DISDIKBUD |
| 5 | Kecukupan formasi guru ASN | % | 2022 | | | 91 | 91 | 50.479.825 | | APBD | DISDIKBUD | | | 111 | 111 | 55.527.808 | | APBD | DISDIKBUD | | | 131 | 131 | 61.080.588 | | APBD | DISDIKBUD |
| 6 | Indeks distribusi guru | % | 2022 | | | 97 | 97 | 28.962.379 | | APBD | DISDIKBUD | | | 117 | 117 | 31.858.616 | | APBD | DISDIKBUD | | | 137 | 137 | 35.044.478 | | APBD | DISDIKBUD |
| 7 | Proporsi PTK bersertifikat | % | 2022 | | | 91 | 91 | 60.852.000 | | APBD | DISDIKBUD | | | 111 | 111 | 66.937.200 | | APBD | DISDIKBUD | | | 131 | 131 | 73.630.920 | | APBD | DISDIKBUD |
| 8 | Proporsi PTK penggerak | % | 2022 | | | 91 | 91 | 34.320.743 | | APBD | DISDIKBUD | | | 111 | 111 | 37.752.817 | | APBD | DISDIKBUD | | | 131 | 131 | 41.528.098 | | APBD | DISDIKBUD |
| 9 | Pengalaman pelatihan guru | % | 2022 | | | 91 | 91 | 72.325.000 | | APBD | DISDIKBUD | | | 111 | 111 | 79.557.500 | | APBD | DISDIKBUD | | | 131 | 131 | 87.513.250 | | APBD | DISDIKBUD |
| 2) | Pendidikan Dasar SD | % | | 33272 | 32493 | | | | | | | 33272 | 32493 | | | | | APBD | DISDIKBUD | 33272 | 32493 | | | | | APBD | DISDIKBUD |
| 1 | Angka partisipasi kasar | % | 2022 | | | 100 | 100 | 55.829.400 | | APBD | DISDIKBUD | | | 100 | 100 | 61.412.340 | | APBD | DISDIKBUD | | | 100 | 100 | 67.553.574 | | APBD | DISDIKBUD |
| 2 | Angka partisipasi sekolah | % | 2022 | | | 100 | 100 | 840.124.296 | | APBD | DISDIKBUD | | | 100 | 100 | 924.136.726 | | APBD | DISDIKBUD | | | 100 | 100 | 1.016.550.398 | | APBD | DISDIKBUD |
| 3 | Angka partisipasi murni | % | 2022 | | | 100 | 100 | 138.325.000 | | APBD | DISDIKBUD | | | 100 | 100 | 152.157.500 | | APBD | DISDIKBUD | | | 100 | 100 | 167.373.250 | | APBD | DISDIKBUD |
| 4 | Kemampuan literasi | Nilai | 2022 | | | 49,92 | 49,92 | 149.218.300 | | APBD | DISDIKBUD | | | 52,17 | 52,17 | 164.140.130 | | APBD | DISDIKBUD | | | 54,42 | 54,42 | 180.554.143 | | APBD | DISDIKBUD |
| 5 | Kemampuan numerasi | Nilai | 2022 | | | 38,15 | 38,15 | 160.325.000 | | APBD | DISDIKBUD | | | 40,40 | 40,40 | 176.357.500 | | APBD | DISDIKBUD | | | 42,65 | 42,65 | 193.993.250 | | APBD | DISDIKBUD |
| 6 | Perbedaan Skor Literasi | Nilai | 2022 | | | - | - | 165.495.000 | | APBD | DISDIKBUD | | | - | - | 182.044.500 | | APBD | DISDIKBUD | | | - | - | 200.248.950 | | APBD | DISDIKBUD |
| 7 | Perbedaan Skor numerasi | Nilai | 2022 | | | - | - | 50.325.000 | | APBD | DISDIKBUD | | | - | - | 55.357.500 | | APBD | DISDIKBUD | | | - | - | 60.893.250 | | APBD | DISDIKBUD |
| 8 | Indeks iklim keamanan | Nilai | 2022 | | | 87,06 | 87,06 | 25.674.000 | | APBD | DISDIKBUD | | | 89,31 | 89,31 | 28.241.400 | | APBD | DISDIKBUD | | | 91,56 | 91,56 | 31.065.540 | | APBD | DISDIKBUD |
| 9 | Indeks iklim kebinekaan | % | 2022 | | | 85,59 | 85,59 | 9.413.800 | | APBD | DISDIKBUD | | | 88,08 | 88,08 | 10.355.180 | | APBD | DISDIKBUD | | | 90,57 | 90,57 | 11.390.698 | | APBD | DISDIKBUD |
| 10 | Indeks iklim inklusivitas | % | 2022 | | | 76,67 | 76,67 | 9.413.800 | | APBD | DISDIKBUD | | | 79,77 | 79,77 | 10.355.180 | | APBD | DISDIKBUD | | | 82,87 | 82,87 | 11.390.698 | | APBD | DISDIKBUD |
| 11 | Kecukupan formasi guru ASN | % | 2022 | | | 139 | 139 | 2.352.405.233 | | APBD | DISDIKBUD | | | 159 | 159 | 2.587.645.756 | | APBD | DISDIKBUD | | | 179 | 179 | 2.846.410.332 | | APBD | DISDIKBUD |
| 12 | Indeks distribusi guru | % | 2022 | | | 120 | 120 | 28.962.379 | | APBD | DISDIKBUD | | | 140 | 140 | 31.858.616 | | APBD | DISDIKBUD | | | 160 | 160 | 35.044.478 | | APBD | DISDIKBUD |
| 13 | Proporsi PTK bersertifikat | % | 2022 | | | 183 | 202 | 122.398.760 | | APBD | DISDIKBUD | | | 203 | 222 | 134.638.636 | | APBD | DISDIKBUD | | | 223 | 242 | 148.102.500 | | APBD | DISDIKBUD |
| 14 | Proporsi PTK penggerak | % | 2022 | | | 120 | 120 | 34.320.743 | | APBD | DISDIKBUD | | | 140 | 140 | 37.752.817 | | APBD | DISDIKBUD | | | 160 | 160 | 41.528.098 | | APBD | DISDIKBUD |
| 15 | Pengalaman pelatihan guru | % | 2022 | | | 160 | 160 | 84.205.000 | | APBD | DISDIKBUD | | | 180 | 180 | 92.625.500 | | APBD | DISDIKBUD | | | 200 | 200 | 101.888.050 | | APBD | DISDIKBUD |
| 3) | Pendidikan Dasar SMP | | | 16234 | 13944 | | | | | | | 16234 | 13944 | | | | | APBD | DISDIKBUD | 16234 | 13944 | | | | | APBD | DISDIKBUD |
| 1 | Angka partisipasi kasar | % | 2022 | | | 100 | 100 | 88.830.500 | | APBD | DISDIKBUD | | | 100 | 100 | 97.713.550 | | APBD | DISDIKBUD | | | 100 | 100 | 107.484.905 | | APBD | DISDIKBUD |
| 2 | Angka partisipasi sekolah | % | 2022 | | | 100 | 100 | 1.715.441.686 | | APBD | DISDIKBUD | | | 100 | 100 | 1.886.985.855 | | APBD | DISDIKBUD | | | 100 | 100 | 2.075.684.441 | | APBD | DISDIKBUD |
| 3 | Angka partisipasi murni | % | 2022 | | | 96,45 | 96,45 | 825.632.500 | | APBD | DISDIKBUD | | | 98,70 | 98,70 | 908.195.750 | | APBD | DISDIKBUD | | | 100,95 | 100,95 | 999.015.325 | | APBD | DISDIKBUD |
| 4 | Kemampuan literasi | Nilai | 2022 | | | 65,82 | 65,82 | 71.885.000 | | APBD | DISDIKBUD | | | 68,84 | 68,84 | 79.073.500 | | APBD | DISDIKBUD | | | 71,86 | 71,86 | 86.980.850 | | APBD | DISDIKBUD |
| 5 | Kemampuan numerasi | Nilai | 2022 | | | 56,26 | 56,26 | 105.369.000 | | APBD | DISDIKBUD | | | 58,25 | 58,25 | 115.905.900 | | APBD | DISDIKBUD | | | 60,24 | 60,24 | 127.496.490 | | APBD | DISDIKBUD |
| 6 | Perbedaan skor literasi | Nilai | 2022 | | | 0 | 0 | 275.392.700 | | APBD | DISDIKBUD | | | 0 | 0 | 302.931.970 | | APBD | DISDIKBUD | | | 0 | 0 | 333.225.167 | | APBD | DISDIKBUD |
| 7 | Perbedaan skor numerasi | Nilai | 2022 | | | 0 | 0 | 138.094.000 | | APBD | DISDIKBUD | | | 0 | 0 | 151.903.400 | | APBD | DISDIKBUD | | | 0 | 0 | 167.093.740 | | APBD | DISDIKBUD |
| 8 | Indeks iklim keamanan | Nilai | 2022 | | | 88,22 | 88,22 | 364.436.068 | | APBD | DISDIKBUD | | | 91,63 | 91,63 | 400.879.675 | | APBD | DISDIKBUD | | | 95,04 | 95,04 | 440.967.642 | | APBD | DISDIKBUD |
| 9 | Indeks iklim kebinekaan | % | 2022 | | | 80,98 | 80,98 | 364.436.068 | | APBD | DISDIKBUD | | | 83,19 | 83,19 | 400.879.675 | | APBD | DISDIKBUD | | | 85,40 | 85,40 | 440.967.642 | | APBD | DISDIKBUD |
| 10 | Indeks iklim inklusivitas | % | 2022 | | | 80,76 | 80,76 | 364.436.068 | | APBD | DISDIKBUD | | | 83,86 | 83,86 | 400.879.675 | | APBD | DISDIKBUD | | | 86,96 | 86,96 | 440.967.642 | | APBD | DISDIKBUD |
| 11 | Kecukupan formasi guru ASN | % | 2022 | | | 116 | 116 | 140.000.000 | | APBD | DISDIKBUD | | | 166 | 166 | 140.000.000 | | APBD | DISDIKBUD | | | 216 | 216 | 140.000.000 | | APBD | DISDIKBUD |
| 12 | Indeks distribusi guru | % | 2022 | | | 100 | 100 | 28.962.379 | | APBD | DISDIKBUD | | | 150 | 150 | 31.858.616 | | APBD | DISDIKBUD | | | 200 | 200 | 35.044.478 | | APBD | DISDIKBUD |
| 13 | Proporsi PTK bersertifikat | % | 2022 | | | 192 | 192 | 108.116.828 | | APBD | DISDIKBUD | | | 242 | 242 | 118.928.510 | | APBD | DISDIKBUD | | | 292 | 292 | 130.821.361 | | APBD | DISDIKBUD |
| 14 | Proporsi PTK penggerak | % | 2022 | | | 100 | 100 | 34.320.743 | | APBD | DISDIKBUD | | | 150 | 150 | 37.752.817 | | APBD | DISDIKBUD | | | 200 | 200 | 41.528.098 | | APBD | DISDIKBUD |
| 15 | Pengalaman pelatihan guru | % | 2022 | | | 176 | 176 | 50.050.000 | | APBD | DISDIKBUD | | | 226 | 226 | 55.055.000 | | APBD | DISDIKBUD | | | 276 | 276 | 60.560.500 | | APBD | DISDIKBUD |
| 4) | Pendidikan Kesetaraan | | | 964 | 964 | | | | | | | 964 | 964 | | | | | APBD | DISDIKBUD | 964 | 964 | | | | | APBD | DISDIKBUD |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|-------|------|--|-------|-------|-------------|-------------|------|-----------|--|-------|-------|-------------|--|-----------|-----------|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|------|
| 1 | Angka partisipasi kasar | % | 2022 | | | | | 167.750.000 | | DISDIKBUD | | | | 184.525.000 | | DISDIKBUD | | | 202.977.500 | | DISDIKBUD | | |
| 2 | Angka partisipasi sekolah | % | 2022 | | 100 | 100 | 489.194.530 | | | DISDIKBUD | | 100 | 100 | 538.113.983 | | DISDIKBUD | | 100 | 100 | 591.925.381 | | DISDIKBUD | |
| 3 | Angka partisipasi murni | % | 2022 | | | | 275.858.000 | | | DISDIKBUD | | | | 303.443.800 | | DISDIKBUD | | | | 333.788.180 | | DISDIKBUD | |
| 4 | Kemampuan literasi | % | 2022 | | 65,82 | 65,82 | 60.995.000 | | APBD | DISDIKBUD | | 68,84 | 68,84 | 67.094.500 | | APBD | DISDIKBUD | | 71,86 | 71,86 | 73.803.950 | | APBD |
| 5 | Kemampuan numerasi | Nilai | 2022 | | 56,26 | 56,26 | 50.358.000 | | APBD | DISDIKBUD | | 58,25 | 58,25 | 55.393.800 | | APBD | DISDIKBUD | | 60,24 | 60,24 | 60.933.180 | | APBD |
| 6 | Perbedaan skor literasi | Nilai | 2022 | | | | 60.753.000 | | | DISDIKBUD | | | | 66.828.300 | | | DISDIKBUD | | | | 73.511.130 | | |
| 7 | Perbedaan skor numerasi | Nilai | 2022 | | | | 259.336.000 | | | DISDIKBUD | | | | 285.269.600 | | | DISDIKBUD | | | | 313.796.560 | | |
| 8 | Indeks iklim keamanan | Nilai | 2022 | | | | 275.253.000 | | | DISDIKBUD | | | | 302.778.300 | | | DISDIKBUD | | | | 333.056.130 | | |
| 9 | Indeks iklim kebinekaan | % | 2022 | | 80,98 | 80,98 | 149.094.000 | | APBD | DISDIKBUD | | 83,19 | 83,19 | 164.003.400 | | APBD | DISDIKBUD | | 85,40 | 85,40 | 180.403.740 | | APBD |
| 10 | Indeks iklim inklusivitas | % | 2022 | | 80,76 | 80,76 | 138.160.000 | | APBD | DISDIKBUD | | 83,86 | 83,86 | 151.976.000 | | APBD | DISDIKBUD | | 86,96 | 86,96 | 167.173.600 | | APBD |
| 11 | Kecukupan formasi guru ASN | % | 2022 | | 41 | 41 | 94.303.000 | | | DISDIKBUD | | 51 | 51 | 103.733.300 | | | DISDIKBUD | | 61 | 61 | 114.106.630 | | |
| 12 | Indeks distribusi guru | % | 2022 | | 41 | 41 | 28.962.379 | | | DISDIKBUD | | 51 | 51 | 31.858.616 | | | DISDIKBUD | | 61 | 61 | 35.044.478 | | |
| 13 | Proporsi PTK bersertifikat | % | 2022 | | 0 | 0 | 83.207.300 | | APBD | DISDIKBUD | | 0 | 0 | 91.528.030 | | APBD | DISDIKBUD | | 0 | 0 | 100.680.833 | | APBD |
| 14 | Proporsi PTK penggerak | % | 2022 | | 0 | 0 | 34.320.743 | | APBD | DISDIKBUD | | 0 | 0 | 37.752.817 | | APBD | DISDIKBUD | | 0 | 0 | 41.528.098 | | APBD |
| 15 | Pengalaman pelatihan guru | % | 2022 | | 86 | 86 | 275.770.000 | | APBD | DISDIKBUD | | 91 | 91 | 303.347.000 | | APBD | DISDIKBUD | | 96 | 96 | 333.681.700 | | APBD |

Kegiatan :

- Kolom 1 : Diisi Nomor urut
- Kolom 2 : Diisi Program
- Kolom 3 : Diisi Kegiatan
- Kolom 4 : Diisi Sub Kegiatan
- Kolom 5 : Diisi Satuan
- Kolom 6 : Diisi Tahun Dasar
- Kolom 7 : Diisi Target
- Kolom 8 : Diisi Realisasi
- Kolom 9 : Diisi Anggaran
- Kolom 10 : Diisi Inisiasi
- Kolom 11 : Diisi Sumber Pendanaan
- Kolom 12 : Diisi Instansi Pelaksana
- Kolom 13 : Diisi Target
- Kolom 14 : Diisi Realisasi
- Kolom 15 : Diisi Anggaran
- Kolom 16 : Diisi Inisiasi
- Kolom 17 : Diisi Sumber Pendanaan
- Kolom 18 : Diisi Instansi Pelaksana
- Kolom 19 : Diisi Target
- Kolom 20 : Diisi Realisasi
- Kolom 21 : Diisi Anggaran
- Kolom 22 : Diisi Inisiasi
- Kolom 23 : Diisi Sumber Pendanaan
- Kolom 24 : Diisi Instansi Pelaksana
- Kolom 25 : Diisi Target
- Kolom 26 : Diisi Realisasi
- Kolom 27 : Diisi Anggaran
- Kolom 28 : Diisi Inisiasi
- Kolom 29 : Diisi Sumber Pendanaan
- Kolom 30 : Diisi Instansi Pelaksana
- Kolom 31 : Diisi Target
- Kolom 32 : Diisi Realisasi
- Kolom 33 : Diisi Anggaran
- Kolom 34 : Diisi Inisiasi
- Kolom 35 : Diisi Sumber Pendanaan
- Kolom 36 : Diisi Instansi Pelaksana

3.2.2 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2023-2027

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Satuan | Tahun Dasar (2022) | Pencapaian SPM 2023 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Pencapaian SPM 2024 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|---|----------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|----------|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|----------|---------------------------|------------------|--------------------|
| | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 1) | Pelayanan kesehatan ibu hamil | | | 5209 | 5209 | | | 3.219.897.125 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 5738 | 5738 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 1 | Vaksin Tetanus Difteri (Td) | Ampul | 2022 | | | 521 | 521 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 574 | 574 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 2 | Tablet tambah darah | Tablet | 2022 | | | 468810 | 468810 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 516420 | 516420 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 3 | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan | Paket | 2022 | | | 5209 | 5209 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 5738 | 5738 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 4 | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB | Paket | 2022 | | | 5209 | 5209 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 5738 | 5738 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 5 | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah | Paket | 2022 | | | 5209 | 5209 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 5738 | 5738 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 6 | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin | Paket | 2022 | | | 5209 | 5209 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 5738 | 5738 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 7 | Kartu ibu/rekam medis ibu | Paket | 2022 | | | 5209 | 5209 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 5738 | 5738 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 8 | Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | Buku | 2022 | | | 5209 | 5209 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 5738 | 5738 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 9 | Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan | Orang | 2022 | | | 4 | 4 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 4 | 4 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 10 | Tenaga kesehatan : Bidan | Orang | 2022 | | | 572 | 572 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 582 | 582 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 11 | Tenaga kesehatan : Perawat | Orang | 2022 | | | 916 | 916 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 926 | 926 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 12 | Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga) | Orang | 2022 | | | 5209 | 5209 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 5738 | 5738 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 2) | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 4688 | 4688 | | | 1.333.530.000 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 5477 | 5744 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 1 | Formulir Partograf | Formulir | 2022 | | | 4688 | 4688 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 5477 | 5477 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 2 | Kartu ibu (rekam medis) | Paket | 2022 | | | 5209 | 5209 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 5738 | 5738 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 3 | Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | Buku | 2022 | | | 5209 | 5209 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 5738 | 5738 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 4 | Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandunga | Orang | 2022 | | | 4 | 4 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 4 | 4 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 5 | Tenaga kesehatan : Bidan | Orang | 2022 | | | 572 | 572 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 582 | 582 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 6 | Tenaga kesehatan : Perawat | Orang | 2022 | | | 916 | 916 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 926 | 926 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 3) | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | 4611 | 4611 | | | 25.720.000 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 5216 | 5216 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 1 | Vaksin Hepatitis B0 | Vaksin | 2022 | | | 4611 | 4611 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 5216 | 5216 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 2 | Vitamin K1 injeksi | Ampul | 2022 | | | 4611 | 4611 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 5216 | 5216 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 3 | Salap/tetes mata antibiotik | Orang | 2022 | | | 4611 | 4611 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 5216 | 5216 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 4 | Formulir bayi baru lahir | Formulir | 2022 | | | 4611 | 4611 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 5216 | 5216 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 5 | Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) | Orang | 2022 | | | 4611 | 4611 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 5216 | 5216 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 6 | Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | Buku | 2022 | | | 4611 | 4611 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 5216 | 5216 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Satuan | Tahun Dasar (2022) | Pencapaian SPM 2023 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Pencapaian SPM 2024 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|-----|--|--------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 11 | Tenaga kesehatan : Penata Rontgen | Orang | 2022 | | | 4 | 4 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 4 | 4 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 12 | Tenaga kesehatan masyarakat | Orang | 2022 | | | 86 | 86 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 84 | 84 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 13 | Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu | Orang | 2022 | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 20 | 20 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 12) | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) | | | 6.109 | 6.109 | | | 362.620.000 | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 6.204 | 6.204 | | ##### | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 1 | Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner) | Media | 2022 | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 2 | Tes cepat HIV (RDT) pertama | Paket | 2022 | | | 6.109 | 6.109 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 6.204 | 6.204 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 3 | Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK | Paket | 2022 | | | 6.109 | 6.109 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 6.204 | 6.204 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 4 | Alat tulis, Rekam Medis | Paket | 2022 | | | 1 | 1 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 1 | 1 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 5 | Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin | Orang | 2022 | | | 2 | 2 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 2 | 2 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 6 | Tenaga kesehatan : Perawat | Orang | 2022 | | | 572 | 572 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 926 | 926 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 7 | Tenaga kesehatan : Bidan | Orang | 2022 | | | 916 | 916 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 582 | 582 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 8 | Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) | Orang | 2022 | | | 56 | 56 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 58 | 58 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 9 | Tenaga kesehatan masyarakat | Orang | 2022 | | | 86 | 86 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 84 | 84 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 10 | Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu | Orang | 2022 | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 20 | 20 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Satuan | Tahun Dasar (2022) | Pencapaian SPM 2023 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Pencapaian SPM 2024 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|-----|--|--------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 8 | Obat Diabetes Mellitus | Paket | 2022 | | | 2605 | 2605 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 2651 | 2651 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 10) | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | | | 565 | 565 | | | 242.470.000 | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 574 | 574 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 1 | Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) | Buku | 2022 | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 2 | Kit berisi 2 Alat Fiksasi | Paket | 2022 | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 3 | Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan | Orang | 2022 | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 1 | 1 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 4 | Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) | Media | 2022 | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 5 | Tenaga kesehatan : Dokter | Orang | 2022 | | | 61 | 61 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 63 | 63 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 6 | Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa | Orang | 2022 | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 7 | Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya | Orang | 2022 | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 11) | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | 4.483 | 4.483 | | | 589.620.000 | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 3.440 | 3.400 | | ##### | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 1 | Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) | Media | 2022 | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 2 | Reagen Zn TB | Paket | 2022 | | | 4.483 | 4.483 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 3.440 | 3.400 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 3 | Masker jenis rumah tangga dan Masker N95 | paket | 2022 | | | 4.483 | 4.483 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 3.440 | 3.400 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 4 | Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pendingin | Paket | 2022 | | | 4.483 | 4.483 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 3.440 | 3.400 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 5 | Catridge tes cepat molekuler | Paket | 2022 | | | 4.483 | 4.483 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 3.440 | 3.400 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 6 | Formulir pencatatan dan pelaporan | Dokume | 2022 | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 7 | Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) | Dokume | 2022 | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 8 | Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru | Orang | 2022 | | | 2 | 2 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 2 | 2 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 9 | Tenaga kesehatan : Perawat | Orang | 2022 | | | 916 | 916 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 926 | 926 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 10 | Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) | Orang | 2022 | | | 56 | 56 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 58 | 58 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Satuan | Tahun Dasar (2022) | Pencapaian SPM 2023 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Pencapaian SPM 2024 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|---------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 2 | Tensimeter | Unit | 2022 | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 3 | Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) | Dokume | 2022 | | | 1 | 1 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 1 | 1 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 4 | Tenaga kesehatan : Dokter | Orang | 2022 | | | 61 | 61 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 63 | 63 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 5 | Tenaga kesehatan : Bidan | Orang | 2022 | | | 572 | 572 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 582 | 582 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 6 | Tenaga kesehatan : Perawat | Orang | 2022 | | | 916 | 916 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 926 | 926 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 7 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | Orang | 2022 | | | 82 | 82 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 84 | 84 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 7 | Obat Hipertensi | Paket | 2022 | | | 68013 | 68013 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 69200 | 69200 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 9) | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | 2022 | 2605 | 2605 | | | 25.720.000 | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 2651 | 2651 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 1 | Alat : Glukometer | Unit | 2022 | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 2 | Alat : Strip Tes Gula Darah | Unit | 2022 | | | 2605 | 2605 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 2651 | 2651 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 3 | Alat : Kapas Alkohol | Unit | 2022 | | | 2605 | 2605 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 2651 | 2651 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 4 | Alat : Lancet | Unit | 2022 | | | 2605 | 2605 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 2651 | 2651 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 5 | Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) | Orang | 2022 | | | 1 | 1 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 1 | 1 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 6 | Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) | Pedoman | 2022 | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 7 | Tenaga kesehatan : Dokter | Orang | 2022 | | | 61 | 61 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 63 | 63 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 8 | Tenaga kesehatan : Bidan | Orang | 2022 | | | 572 | 572 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 582 | 582 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 5 | Tenaga kesehatan : Perawat | Orang | 2022 | | | 916 | 916 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 926 | 926 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 6 | Tenaga kesehatan : Ahli Gizi | Orang | 2022 | | | 86 | 86 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 88 | 88 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 7 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | Orang | 2022 | | | 82 | 82 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 84 | 84 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Satuan | Tahun Dasar (2022) | Pencapaian SPM 2023 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Pencapaian SPM 2024 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|---------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 10 | Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) | Unit | 2022 | | | 1 | 1 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 1 | 1 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 11 | Tenaga kesehatan : Dokter | Dokume | 2022 | | | 61 | 61 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 63 | 63 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 12 | Tenaga kesehatan : Bidan | Orang | 2022 | | | 572 | 572 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 582 | 582 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 13 | Tenaga kesehatan : Perawat | Orang | 2022 | | | 916 | 916 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 926 | 926 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 14 | Tenaga kesehatan : Ahli Gizi | Orang | 2022 | | | 87 | 87 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 88 | 88 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 15 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | Orang | 2022 | | | 82 | 82 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 84 | 84 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 17 | Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu | Orang | 2022 | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 7) | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | | | 23647 | | | | 589.807.500 | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 24881 | 24881 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 1 | Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol | Paket | 2022 | | | 23647 | 23647 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 24881 | 24881 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 2 | Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) | Paket | 2022 | | | 23647 | 23647 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 24881 | 24881 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 3 | Buku kesehatan lansia | Buku | 2022 | | | 23647 | 23647 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 24881 | 24881 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 4 | Tenaga kesehatan : Dokter | Orang | 2022 | | | 61 | 61 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 63 | 63 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 5 | Tenaga kesehatan : Bidan | Orang | 2022 | | | 572 | 572 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 582 | 582 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 6 | Tenaga kesehatan : Perawat | Orang | 2022 | | | 916 | 916 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 926 | 926 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 7 | Tenaga kesehatan : Ahli Gizi | Orang | 2022 | | | 86 | 86 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 88 | 88 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 8 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | Orang | 2022 | | | 82 | 82 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 84 | 84 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 9 | Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu | Orang | 2022 | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 8) | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | 68013 | 68013 | | | 1.404.130.715 | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 69200 | 69200 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 1 | Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) | Pedoman | 2022 | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Satuan | Tahun Dasar (2022) | Pencapaian SPM 2023 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Pencapaian SPM 2024 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|----------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 2 | Buku pemantauan kesehatan | Buku | 2022 | | | 40851 | 40851 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 43764 | 43764 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 3 | Kuesioner skrining kesehatan | Dokume | 2022 | | | 40851 | 40851 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 43764 | 43764 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 4 | Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah | Dokume | 2022 | | | 40851 | 40851 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 43764 | 43764 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 5 | Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah | Formulir | 2022 | | | 40851 | 40851 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 43764 | 43764 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 6 | Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi | Orang | 2022 | | | 19 | 19 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 19 | 19 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 7 | Tenaga kesehatan : Bidan | Orang | 2022 | | | 572 | 572 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 582 | 582 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 8 | Tenaga kesehatan : Perawat | Orang | 2022 | | | 916 | 916 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 926 | 926 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 9 | Tenaga kesehatan : Ahli Gizi | Orang | 2022 | | | 86 | 86 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 88 | 88 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 10 | Tenaga Kesehatan : Masyarakat | Orang | 2022 | | | 82 | 82 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 84 | 84 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 11 | Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan | Orang | 2022 | | | 590 | 590 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 12 | Tenaga Non kesehatan : Guru | Orang | 2022 | | | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 6) | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | | | | 190843 | 190843 | | 25.720.000 | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 199308 | 199308 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 1 | Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) | Pedoma | 2022 | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 2 | Alat ukur berat badan | Unit | 2022 | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 3 | Alat : Alat ukur lingkar perut | Unit | 2022 | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 4 | Alat : Tensimeter | Unit | 2022 | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 5 | Alat : Glukometer | Unit | 2022 | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 6 | Alat : Tes strip gula darah | Unit | 2022 | | | 190843 | 190843 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 199308 | 199308 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 7 | Alat : Lancet | Unit | 2022 | | | 190843 | 190843 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 199308 | 199308 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 8 | Alat : Kapas alkohol | Unit | 2022 | | | 190843 | 190843 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 199308 | 199308 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 9 | Alat : KIT IVA Tes | Unit | | | | 81124 | 81124 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 99654 | 99654 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Satuan | Tahun Dasar (2022) | Pencapaian SPM 2023 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Pencapaian SPM 2024 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|----------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 7 | Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak | Orang | 2022 | | | 2 | 2 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 2 | 2 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 8 | Tenaga kesehatan : Bidan | Orang | 2022 | | | 572 | 572 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 582 | 582 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 9 | Tenaga kesehatan : Perawat | Orang | 2022 | | | 916 | 916 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 926 | 926 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 4) | Pelayanan Kesehatan Balita | | | 18641 | 18641 | | | 2.597.601.814 | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 25057 | 25057 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 1 | Kuisisioner Pra Skining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku | Dokume | 2022 | | | 18641 | 18641 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 25057 | 25057 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 2 | Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) | Formulir | 2022 | | | 18641 | 18641 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 25057 | 25057 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 3 | Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA) | Buku | 2022 | | | 5209 | 5209 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 5738 | 5738 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 4 | Vitamin A Biru | Kapsul | 2022 | | | 18641 | 18641 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 25057 | 25057 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 5 | Vitamin A Merah | Kapsul | 2022 | | | 18641 | 18641 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 25057 | 25057 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 6 | Vaksin imunisasi dasar HBO | Vaksin | 2022 | | | 18641 | 18641 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 25057 | 25057 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 7 | Vaksin imunisasi dasar BCG | Vaksin | 2022 | | | 1865 | 1865 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 2506 | 2506 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 8 | Vaksin imunisasi dasar Polio | Orang | 2022 | | | 3728 | 3728 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 5011 | 5011 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 9 | Vaksin imunisasi dasar IPV | Vaksin | 2022 | | | 1865 | 1865 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 2506 | 2506 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 10 | Vaksin imunisasi dasar DPT -HB -Hib | Vaksin | 2022 | | | 1865 | 1865 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 2506 | 2506 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 11 | Vaksin imunisasi dasar Campak | Vaksin | 2022 | | | 1865 | 1865 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 2506 | 2506 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 12 | Vaksin imunisasi dasar Rubella | Vaksin | 2022 | | | 1865 | 1865 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 2506 | 2506 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 13 | Vaksin imunisasi lanjutan DPT -HB -Hib | Vaksin | 2022 | | | 1865 | 1865 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 2506 | 2506 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 14 | Vaksin imunisasi lanjutan Campak | Vaksin | 2022 | | | 1865 | 1865 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 2506 | 2506 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 15 | Vaksin imunisasi lanjutan Rubella | Vaksin | 2022 | | | 1865 | 1865 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 2506 | 2506 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 16 | Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP) | Unit | 2022 | | | 18641 | 18641 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 25057 | 25057 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 17 | Peralatan Anafilaktik | Paket | 2022 | | | 19 | 19 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 19 | 19 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 18 | Tenaga kesehatan : Dokter | Orang | 2022 | | | 61 | 61 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 63 | 63 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 19 | Tenaga kesehatan : Bidan | Orang | 2022 | | | 572 | 572 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 582 | 582 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 20 | Tenaga kesehatan : Perawat | Orang | 2022 | | | 916 | 916 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 926 | 926 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 21 | Tenaga kesehatan : Ahli Gizi | Orang | 2022 | | | 86 | 86 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 88 | 88 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 22 | Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan | Orang | 2022 | | | 805 | 805 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 820 | 820 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 23 | Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD | Orang | 2022 | | | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 5) | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | | | 40851 | 40851 | | | 855.290.000 | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 43764 | 43764 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |
| 1 | Buku raport kesehatanku | Buku | 2022 | | | 40851 | 40851 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 43764 | 43764 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2025 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Pencapaian SPM 2026 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Pencapaian SPM 2027 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|------------------------|-----------|--------------|-----------|----------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|----------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|----------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 1) | Pelayanan kesehatan ibu hamil | 5763 | 5763 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 5878 | 5878 | | | | 118 | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 5996 | 5996 | | | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB |
| 1 | Vaksin Tetanus Difteri (Td) | | | 5763 | 5763 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5878 | 5878 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5996 | 5996 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 2 | Tablet tambah darah | | | 518670 | 518670 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 529043 | 529043 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 539624 | 539624 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 3 | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan | | | 5763 | 5763 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5763 | 5763 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5996 | 5996 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 4 | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB | | | 5763 | 5763 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5763 | 5763 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5996 | 5996 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 5 | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah | | | 5763 | 5763 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5763 | 5763 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5996 | 5996 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 6 | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin | | | 5763 | 5763 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5763 | 5763 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5996 | 5996 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 7 | Kartu ibu/rekam medis ibu | | | 5763 | 5763 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5763 | 5763 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5996 | 5996 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 8 | Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | | | 5763 | 5763 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5763 | 5763 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5996 | 5996 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 9 | Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan | | | 4 | 4 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 4 | 4 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 4 | 4 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 10 | Tenaga kesehatan : Bidan | | | 592 | 592 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 602 | 602 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 607 | 607 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 11 | Tenaga kesehatan : Perawat | | | 936 | 936 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 946 | 946 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 953 | 953 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 12 | Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga | | | 5763 | 5763 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5763 | 5763 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5996 | 5996 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 2) | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 5501 | 5501 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 5611 | 5611 | | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 5723 | 5723 | | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 1 | Formulir Partograf | | | 5501 | 5501 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5611 | 5611 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5723 | 5723 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 2 | Kartu ibu (rekam medis) | | | 5763 | 5763 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5763 | 5763 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5996 | 5996 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 3 | Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | | | 5763 | 5763 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5763 | 5763 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5996 | 5996 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 4 | Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan | | | 4 | 4 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 4 | 4 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 4 | 4 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 5 | Tenaga kesehatan : Bidan | | | 592 | 592 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 602 | 602 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 607 | 607 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 6 | Tenaga kesehatan : Perawat | | | 936 | 936 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 946 | 946 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 953 | 953 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 3) | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 5239 | 5239 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 5344 | 5344 | | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 5451 | 5451 | | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 1 | Vaksin Hepatitis B0 | | | 5239 | 5239 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5344 | 5344 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5451 | 5451 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 2 | Vitamin K1 injeksi | | | 5239 | 5239 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5344 | 5344 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5451 | 5451 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 3 | Salap/tetes mata antibiotik | | | 5239 | 5239 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5344 | 5344 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5451 | 5451 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 4 | Formulir bayi baru lahir | | | 5239 | 5239 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5344 | 5344 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5451 | 5451 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 5 | Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) | | | 5239 | 5239 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5344 | 5344 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5451 | 5451 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 6 | Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | | | 5239 | 5239 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5344 | 5344 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5451 | 5451 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 7 | Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak | | | 2 | 2 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2 | 2 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2 | 2 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 8 | Tenaga kesehatan : Bidan | | | 592 | 592 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 602 | 602 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 607 | 607 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2025 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Pencapaian SPM 2026 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Pencapaian SPM 2027 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|------------------------|-----------|--------------|-----------|----------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------|------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-----------|----------|----------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 9 | Tenaga kesehatan : Perawat | | | 936 | 936 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 946 | 946 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 953 | 953 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 4) | Pelayanan Kesehatan Balita | 25178 | 25178 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 25682 | 25682 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 26195 | 26195 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | | | |
| 1 | Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku | | | 25178 | 25178 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 25682 | 25682 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 26195 | 26195 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 2 | Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) | | | 25178 | 25178 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 25682 | 25682 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 26195 | 26195 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 3 | Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA) | | | 5763 | 5763 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5763 | 5763 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5996 | 5996 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 4 | Vitamin A Biru | | | 25178 | 25178 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 25682 | 25682 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 26195 | 26195 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 5 | Vitamin A Merah | | | 25178 | 25178 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 25682 | 25682 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 26195 | 26195 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 6 | Vaksin imunisasi dasar: HBO | | | 25178 | 25178 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 25682 | 25682 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 26195 | 26195 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 7 | Vaksin imunisasi dasar: BCG | | | 2518 | 2518 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2568 | 2568 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2620 | 2620 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 8 | Vaksin imunisasi dasar: Polio | | | 5036 | 5036 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5136 | 5136 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 5239 | 5239 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 9 | Vaksin imunisasi dasar: IPV | | | 2518 | 2518 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2568 | 2568 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2620 | 2620 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 10 | Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib | | | 2518 | 2518 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2568 | 2568 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2620 | 2620 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 11 | Vaksin imunisasi dasar: Campak | | | 2518 | 2518 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2568 | 2568 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2620 | 2620 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 12 | Vaksin imunisasi dasar: Rubella | | | 2518 | 2518 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2568 | 2568 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2620 | 2620 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 13 | Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib | | | 2518 | 2518 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2568 | 2568 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2620 | 2620 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 14 | Vaksin imunisasi lanjutan : Campak | | | 2518 | 2518 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2568 | 2568 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2620 | 2620 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 15 | Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella | | | 2518 | 2518 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2568 | 2568 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2620 | 2620 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 16 | Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP) | | | 25178 | 25178 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 25682 | 25682 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 26195 | 26195 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 17 | Peralatan Anafilaktik | | | 19 | 19 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 19 | 19 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 19 | 19 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 18 | Tenaga kesehatan : Dokter | | | 66 | 66 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 69 | 69 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 72 | 72 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 19 | Tenaga kesehatan : Bidan | | | 592 | 592 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 602 | 602 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 607 | 607 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 20 | Tenaga kesehatan : Perawat | | | 936 | 936 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 946 | 946 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 953 | 953 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 21 | Tenaga kesehatan : Ahli Gizi | | | 90 | 90 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 92 | 92 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 94 | 94 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 22 | Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan | | | 840 | 840 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 860 | 860 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 880 | 880 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 23 | Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD | | | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 5) | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 43885 | 43885 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 44763 | 44763 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 45658 | 45658 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | | | |
| 1 | Buku raport kesehatanku | | | 43885 | 43885 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 44763 | 44763 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 45658 | 45658 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 2 | Buku pemantauan kesehatan | | | 43885 | 43885 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 44763 | 44763 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 45658 | 45658 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 3 | Kuesioner skrining kesehatan | | | 43885 | 43885 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 44763 | 44763 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 45658 | 45658 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 4 | Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah | | | 43885 | 43885 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 44763 | 44763 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 45658 | 45658 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2025 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Pencapaian SPM 2026 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Pencapaian SPM 2027 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|------------------------|-----------|--------------|-----------|----------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|---------------------------|-------------|----------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-----------|----------|----------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 5 | Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah | | | 43885 | 43885 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 44763 | 44763 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 45658 | 45658 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 6 | Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi | | | 19 | 19 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 19 | 19 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 19 | 19 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 7 | Tenaga kesehatan : Bidan | | | 592 | 592 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 602 | 602 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 607 | 607 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 8 | Tenaga kesehatan : Perawat | | | 936 | 936 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 946 | 946 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 953 | 953 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 9 | Tenaga kesehatan : Ahil Gizi | | | 90 | 90 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 92 | 92 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 94 | 94 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 10 | Tenaga Kesehatan : Masyarakat | | | 86 | 86 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 90 | 90 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 92 | 92 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 11 | Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan | | | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 12 | Tenaga Non kesehatan : Guru | | | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 6) | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | 202708 | 202708 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 212843 | 212843 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 223486 | 212843 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 1 | Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 2 | Alat ukur berat badan | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 3 | Alat : Alat ukur lingkar perut | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 4 | Alat : Tensimeter | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 5 | Alat : Glukometer | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 6 | Alat : Tes strip gula darah | | | 202708 | 202708 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 212843 | 212843 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 223486 | 212843 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 7 | Alat : Lancet | | | 202708 | 202708 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 212843 | 212843 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 223486 | 212843 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 8 | Alat : Kapas alkohol | | | 202708 | 202708 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 212843 | 212843 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 223486 | 212843 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 9 | Alat : KIT IVA Tes | | | 101354 | 101354 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 106422 | 106422 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 111743 | 106422 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 10 | Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) | | | 1 | 1 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 1 | 1 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 1 | 1 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 11 | Tenaga kesehatan : Dokter | | | 66 | 66 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 69 | 69 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 72 | 72 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2025 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Pencapaian SPM 2026 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Pencapaian SPM 2027 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|------------------------|-----------|--------------|-----------|----------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|---------------------------|-------------|----------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 12 | Tenaga kesehatan : Bidan | | | 592 | 592 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 602 | 602 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 607 | 607 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | |
| 13 | Tenaga kesehatan : Perawat | | | 936 | 936 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 946 | 946 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 953 | 953 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | |
| 14 | Tenaga kesehatan : Ahli Gizi | | | 90 | 90 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 92 | 92 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 94 | 94 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | |
| 15 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | | | 86 | 86 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 90 | 90 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 92 | 92 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | |
| 17 | Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | |
| 7) | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut | 26150 | 26150 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 26935 | 26935 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 27743 | 27743 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | |
| 1 | Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol | | | 26150 | 26150 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 26935 | 26935 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 27743 | 27743 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | |
| 2 | Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) | | | 26150 | 26150 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 26935 | 26935 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 27743 | 27743 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | |
| 3 | Buku kesehatan lansia | | | 26150 | 26150 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 26935 | 26935 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 27743 | 27743 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | |
| 4 | Tenaga kesehatan : Dokter | | | 66 | 66 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 69 | 69 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 72 | 72 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | |
| 5 | Tenaga kesehatan : Bidan | | | 592 | 592 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 602 | 602 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 607 | 607 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | |
| 6 | Tenaga kesehatan : Perawat | | | 936 | 936 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 946 | 946 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 953 | 953 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | |
| 7 | Tenaga kesehatan : Ahli Gizi | | | 90 | 90 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 92 | 92 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 94 | 94 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | |
| 8 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | | | 86 | 86 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 90 | 90 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 92 | 92 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | |
| 9 | Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | |
| 8) | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 70380 | 70380 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 73899 | 73899 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 77594 | 73899 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | |
| 1 | Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | |
| 2 | Tensimeter | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | |
| 3 | Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) | | | 1 | 1 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 1 | 1 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 1 | 1 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | |
| 4 | Tenaga kesehatan : Dokter | | | 66 | 66 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 69 | 69 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 72 | 72 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2025 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Pencapaian SPM 2026 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Pencapaian SPM 2027 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|-----|--|------------------------|-----------|--------------|-----------|----------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|-------------|----------|------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-----------|----------|----------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 5 | Tenaga kesehatan : Bidan | | | 592 | 592 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 602 | 602 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 607 | 607 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 6 | Tenaga kesehatan : Perawat | | | 936 | 936 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 946 | 946 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 953 | 953 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 7 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | | | 86 | 86 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 90 | 90 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 92 | 92 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 7 | Obat Hipertensi | | | 70380 | 70380 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 73899 | 73899 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 77594 | 73899 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 9) | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 2696 | 2696 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 2831 | 2831 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 2972 | 2972 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | | | |
| 1 | Alat : Glukometer | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 2 | Alat : Strip Tes Gula Darah | | | 2696 | 2696 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2831 | 2831 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2972 | 2972 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 3 | Alat : Kaps Alkohol | | | 2696 | 2696 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2831 | 2831 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2972 | 2972 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 4 | Alat : Lancet | | | 2696 | 2696 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2831 | 2831 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2972 | 2972 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 5 | Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) | | | 1 | 1 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 1 | 1 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 1 | 1 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 6 | Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 7 | Tenaga kesehatan : Dokter | | | 66 | 66 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 69 | 69 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 71 | 71 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 8 | Tenaga kesehatan : Bidan | | | 592 | 592 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 602 | 602 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 607 | 607 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 5 | Tenaga kesehatan : Perawat | | | 936 | 936 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 946 | 946 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 953 | 953 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 6 | Tenaga kesehatan : Ahli Gizi | | | 90 | 90 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 92 | 92 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 94 | 94 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 7 | Tenaga Kesehatan Masyarakat | | | 86 | 86 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 90 | 90 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 92 | 92 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 8 | Obat Diabetes Melitus | | | 2696 | 2696 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2831 | 2831 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2972 | 2972 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 10) | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat | 582 | 582 | | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 611 | 611 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 642 | 642 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | | | |
| 1 | Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 2 | Kit berisi 2 Alat Fiksasi | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2025 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Pencapaian SPM 2026 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Pencapaian SPM 2027 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|-----|--|------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|---------------------------|-------------|----------|------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|-----------|----------|----------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 3 | Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan | | | 1 | 1 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 1 | 1 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 1 | 1 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 4 | Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 5 | Tenaga kesehatan : Dokter | | | 66 | 66 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 69 | 69 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 72 | 72 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 6 | Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 7 | Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 11) | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 3.560 | 3.560 | | | 790.000.000 | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 3.735 | 3.735 | 3.735 | 810.000.000 | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 3.772 | 3.772 | 810.000.000 | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | | |
| 1 | Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 2 | Reagen Zn TB | | | 3.560 | 3.560 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 3.735 | 3.735 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 3.772 | 3.772 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 3 | Masker jenis rumah tangga dan Masker N95 | | | 3.560 | 3.560 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 3.735 | 3.735 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 3.772 | 3.772 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 4 | Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lid). Rak pengering | | | 3.560 | 3.560 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 3.735 | 3.735 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 3.772 | 3.772 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 5 | Catridge tes cepat molekuler | | | 3.560 | 3.560 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 3.735 | 3.735 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 3.772 | 3.772 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 6 | Formulir pencatatan dan pelaporan | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 7 | Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) | | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 17 | 17 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 8 | Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru | | | 2 | 2 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2 | 2 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 2 | 2 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 9 | Tenaga kesehatan : Perawat | | | 936 | 936 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 946 | 946 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 953 | 953 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 10 | Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) | | | 60 | 60 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 62 | 62 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 64 | 64 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 11 | Tenaga kesehatan : Penata Rontgen | | | 6 | 6 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 6 | 6 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 6 | 6 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 12 | Tenaga kesehatan masyarakat | | | 86 | 86 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 90 | 90 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 92 | 92 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 13 | Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu | | | 20 | 20 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 20 | 20 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 20 | 20 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |
| 12) | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) | 6.330 | 6.330 | | | ##### | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 6.405 | 6.405 | | ##### | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | 6.469 | 6.469 | ##### | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | | |
| 1 | Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner) | | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | 34 | 34 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | | | |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2025 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Pencapaian SPM 2026 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Pencapaian SPM 2027 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|---|------------------------|-----------|--------------|-----------|----------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|----------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|----------|---------------------------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 2 | Tes cepat HIV (RDT) pertama | | | 6.330 | 6.330 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 6.405 | 6.405 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 6.469 | 6.469 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 3 | Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK | | | 6.330 | 6.330 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 6.405 | 6.405 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 6.469 | 6.469 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 4 | Alat tulis, Rekam Medis | | | 1 | 1 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 1 | 1 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 1 | 1 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 5 | Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin | | | 3 | 3 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 3 | 3 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 3 | 3 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 6 | Tenaga kesehatan : Perawat | | | 936 | 936 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 946 | 946 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 953 | 953 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 7 | Tenaga kesehatan : Bidan | | | 592 | 592 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 602 | 602 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 607 | 607 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 8 | Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) | | | 60 | 60 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 62 | 62 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 64 | 64 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 9 | Tenaga kesehatan masyarakat | | | 86 | 86 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 90 | 90 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 92 | 92 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |
| 10 | Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu | | | 20 | 20 | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 20 | 20 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | | | 20 | 20 | | | DAU / DAK / BOK Puskesmas | Dinkes PPKB | |

3.2.3 Rencana Aksi Daerah penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023-2027

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Satuan | Tahun Dasar (2023) | Pencapaian SPM 2023 | | | | | Inisiasi | Instansi Pelaksana |
|----|---|--------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------------|
| | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1) | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) | Sambungan Rumah/SR | 2023 | 49.583 | 49.583 | 475 | 475 | 15.420.876.495 | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 2 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau) | Sambungan Rumah/SR | 2023 | | | | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 3 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) | Rumah Tangga | 2023 | | | | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 4 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau) | Rumah Tangga | 2023 | 49.583 | 49.583 | 727 | 727 | 178.858.000 | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 2) | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 1 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) | Rumah Tangga | 2023 | | | | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 2 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar) | Rumah Tangga | 2023 | 37.182 | 37.182 | 964 | 964 | 7.199.022.000 | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 3 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan) | Rumah Tangga | 2023 | | | 5 | - | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 4 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) | Rumah Tangga | 2023 | | | 10 | - | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 5 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan) | Rumah Tangga | 2023 | | | 4 | - | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2024 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|---|------------------------|-----------|--------------|-----------|----------------|----------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1) | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) | 49.583 | 49.583 | 750 | 750 | 17.734.007.969 | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 2 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau) | | | | | - | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 3 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) | | | | | - | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 4 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau) | 49.583 | 49.583 | 50 | 50 | 205.686.700 | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 2) | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) | | | | | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 2 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar) | 37.182 | 37.182 | 250 | 250 | 8.278.875.300 | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 3 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan) | | | 5 | 5 | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 4 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) | | | 10 | 10 | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 5 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan) | | | 4 | 4 | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2025 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|---|------------------------|-----------|--------------|-----------|----------------|----------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 1 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1) | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) | 49.583 | 49.583 | 750 | 750 | 20.394.109.165 | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 2 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau) | | | | | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 3 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) | | | | | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 4 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau) | 49.583 | 49.583 | 50 | 50 | 236.539.705 | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 2) | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) | | | | | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 2 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar) | 37.182 | 37.182 | 250 | 250 | 9.520.706.595 | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 3 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan) | | | 5 | 5 | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 4 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) | | | 10 | 10 | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 5 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan) | | | 4 | 4 | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2026 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|---|------------------------|-----------|--------------|-----------|----------------|----------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 1 | 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1) | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) | 475 | 475 | | | 23.453.225.539 | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 2 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau) | 400 | - | | | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 3 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) | 200 | - | | | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 4 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau) | 727 | 727 | | | 272.020.661 | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 2) | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) | 1 | - | | | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 2 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar) | 250 | 964 | | | 10.948.812.584 | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 3 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan) | | | 5 | 5 | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 4 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) | | | 10 | 10 | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 5 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan) | | | 4 | 4 | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2027 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|---|------------------------|-----------|--------------|-----------|----------------|----------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 1 | 2 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 1) | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) | 475 | - | | | 26.971.209.370 | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 2 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau) | 400 | - | | | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 3 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) | 200 | - | | | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 4 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau) | 727 | - | | | 312.823.760 | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 2) | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) | 1 | - | | | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 2 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar) | 250 | - | | | 12.591.134.472 | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 3 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan) | | | 5 | 5 | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 4 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) | | | 10 | 10 | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |
| 5 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan) | | | 4 | 4 | | | APBD (DAK/DAU) | DPUPR |

3.2.4 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023-2027

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Satuan | Tahun Dasar (2022) | Pencapaian SPM 2023 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|---------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|----------|------------------|--------------------|
| | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1) | Pendanaan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | 2022 | | | | | | | | |
| 1 | Identifikasi Perumahan dilokasi rawan Bencana atau terkena Relokasi Progam Kabupaten/Kota | Dokumen | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rp 6.490.600 | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 2 | Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi Relokasi Perumahan | Dokumen | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rp 33.571.025 | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 2) | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Dokumen | 2022 | | | | | | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 1 | Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana | Dokumen | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rp 73.299.150 | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 2 | Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana | Dokumen | 2022 | - | - | - | - | Rp - | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 3 | Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Dokumen | 2022 | - | - | - | - | Rp - | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 4 | Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana | Dokumen | 2022 | | | | | Rp - | DPRPPLH | APBD | APBD |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2024 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|----------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1) | Pendanaan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1 | Identifikasi Perumahan di lokasi rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 4 | 4 | 4 | 4 | 25.000.000 | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 2 | Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi Relokasi Perumahan | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.000.000 | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 2) | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 1 | 1 | 1 | 1 | | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 1 | Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana | 4 | 4 | 4 | 4 | 47.653.000 | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 2 | Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana | 1 | 1 | 1 | 1 | 142.000.000 | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 3 | Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.000.000 | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 4 | Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.000.000 | DPRPPLH | APBD | APBD |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2025 | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|----|--|------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | | | | Anggaran |
| 1 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1) | Pendanaan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1 | Identifikasi Perumahan dilokasi rawan Bencana atau terkena Relokasi Progam Kabupaten/Kota | 4 | 4 | 4 | 4 | 25.000.000 | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 2 | Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi Relokasi Perumahan | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.000.000 | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 2) | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 1 | Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana | 2 | 2 | 2 | 2 | 50.000.000 | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 2 | Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana | 4 | 4 | 4 | 4 | 150.000.000 | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 3 | Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.000.000 | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 4 | Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.000.000 | DPRPPLH | APBD | APBD |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2026 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|----------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 1 | 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1) | Pendanaan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1 | Identifikasi Perumahan dilokasi rawan Bencana atau terkena Relokasi Progam Kabupaten/Kota | 4 | 4 | 4 | 4 | 25.000.000 | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 2 | Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi Relokasi Perumahan | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.000.000 | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 2) | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 1 | Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana | 2 | 2 | 2 | 2 | 60.000.000 | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 2 | Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana | 4 | 4 | 4 | 4 | 160.000.000 | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 3 | Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.000.000 | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 4 | Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.000.000 | DPRPPLH | APBD | APBD |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2027 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|-----------|--|------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|----------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 1 | 2 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 1) | Pendanaan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1 | Identifikasi Perumahan dilokasi rawan Bencana atau terkena Relokasi Progam Kabupaten/Kota | 4 | 4 | 4 | 4 | 25.000.000 | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 2 | Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi Relokasi Perumahan | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.000.000 | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 2) | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 1 | Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.000.000 | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 2 | Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana | 5 | 5 | 5 | 5 | 170.000.000 | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 3 | Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 2 | 2 | 2 | 2 | 70.000.000 | DPRPPLH | APBD | APBD |
| 4 | Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.000.000 | DPRPPLH | APBD | APBD |

3.2.5 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023-2027

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Satuan | Tahun Dasar (2022) | Pencapaian SPM 2023 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|---------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|------------|------------------|--------------------|
| | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1) | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) | | | | | | | | | | |
| 1 | Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional) | Unit | 2022 | 60 | 36 | 36 | 36 | Rp - | SAT POL PP | APBD | APBD |
| 2 | Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli) | Dokumen | 2022 | 6 | 3 | 3 | 3 | Rp - | SAT POL PP | APBD | APBD |
| 3 | Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Pelindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM) | Orang | 2022 | 663 | 30 | 30 | 30 | Rp 37.310.750 | SAT POL PP | APBD | APBD |
| 4 | Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan) | Dokumen | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rp - | SAT POL PP | APBD | APBD |
| 5 | Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) | Orang | 2022 | 8 | 8 | 8 | 8 | Rp - | SAT POL PP | APBD | APBD |
| 6 | Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat) | Orang | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rp - | SAT POL PP | APBD | APBD |
| 2) | Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan) | | | | | | | Rp 3.800.000 | | | |
| 1 | Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal) | Dokumen | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rp - | BPBD | APBD | APBD |
| 2 | Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana | Orang | 2022 | 267.569 | 42.313 | 42.313 | 42.313 | Rp - | BPBD | APBD | APBD |
| 3 | Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia) | Orang | 2022 | 267.569 | 117.584 | 117.584 | 117.584 | Rp - | BPBD | APBD | APBD |
| 4 | Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana | Unit | 2022 | 65 | 64 | 64 | 64 | Rp 20.157.600 | BPBD | APBD | APBD |
| 5 | Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana | Unit | 2022 | 58 | 48 | 48 | 48 | Rp - | BPBD | APBD | APBD |
| 3) | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) | | | | | | | | | | |
| 1 | Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll) | Orang | 2022 | 65 | 10 | 10 | 10 | Rp - | BPBD | APBD | APBD |
| 2 | Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana) | Posko | 2022 | 12 | 4 | 4 | 4 | Rp - | BPBD | APBD | APBD |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Satuan | Tahun Dasar (2022) | Pencapaian SPM 2023 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|---|--------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|----------|------------------|--------------------|
| | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)) | | | | | | | | | | |
| 1 | Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll) | Orang | 2022 | 5.000 | 7.789 | 7.789 | 7.789 | Rp - | BPBD | APBD | APBD |
| 2 | Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana) | Dokumen | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | Rp 31.355.800 | BPBD | APBD | APBD |
| 3 | Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana | Layanan | 2022 | 12 | 12 | 12 | 12 | Rp 23.855.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 4 | Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana | Layanan | 2022 | 50 | 3 | 3 | 3 | - | BPBD | APBD | APBD |
| 5 | Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana | Layanan | 2022 | 18 | 10 | 10 | 10 | 7.199.022.000 | BPBD | APBD | APBD |
| | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) | | | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar) | Dokumen | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | BPBD | APBD | APBD |
| 2 | Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.) | Unit | 2022 | 44 | 18 | 18 | 18 | - | BPBD | APBD | APBD |
| 3 | Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.) | Orang | 2022 | 26 | 9 | 9 | 9 | - | BPBD | APBD | APBD |
| 4 | Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I) | Layanan | 2022 | 18 | - | - | - | - | BPBD | APBD | APBD |
| 5 | Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung) | Layanan | 2022 | 18 | - | - | - | - | BPBD | APBD | APBD |
| 6 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran) | Rumah Tangga | 2022 | 4 | - | - | - | - | BPBD | APBD | APBD |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2024 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|------------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1) | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) | | | | | | | | |
| 1 | Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional) | 60 | 40 | 40 | 40 | 45.000.000 | SAT POL PP | APBD | SATPOL PP |
| 2 | Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli) | 6 | 4 | 4 | 4 | 76.500.000 | SAT POL PP | APBD | SATPOL PP |
| 3 | Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM) | 663 | 35 | 35 | 35 | 47.310.750 | SAT POL PP | APBD | SATPOL PP |
| 4 | Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan) | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.442.600 | SAT POL PP | APBD | SATPOL PP |
| 5 | Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) | 8 | 8 | 8 | 8 | 150.000.000 | SAT POL PP | APBD | SATPOL PP |
| 6 | Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena <u>cedera fisik sedang dan/atau berat</u>) | 2 | 2 | 2 | 2 | 50.000.000 | SAT POL PP | APBD | SATPOL PP |
| 2) | Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan) | | | | | 35.000.000 | | | |
| 1 | Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal) | 1 | 1 | 1 | 1 | 73.625.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 2 | Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana | 284.135 | 46.544 | 46.544 | 46.544 | 15.000.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 3 | Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia) | 284.135 | 129.342 | 129.342 | 129.342 | 15.000.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 4 | Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana | 65 | 65 | 65 | 65 | 150.000.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 5 | Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana | 58 | 53 | 53 | 53 | 26.270.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 3) | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) | | | | | | | | |
| 1 | Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll) | 65 | 11 | 11 | 11 | 38.372.600 | BPBD | APBD | APBD |
| 2 | Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana) | 12 | 6 | 6 | 6 | 32.867.000 | BPBD | APBD | APBD |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2024 | | | | Anggaran | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|---|------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|----------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | | | | |
| | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)) | | | | | | | | |
| 1 | Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50.000.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 2 | Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana) | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.867.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 3 | Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana | 12 | 12 | 12 | 12 | 75.000.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 4 | Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana | 50 | 6 | 6 | 6 | | BPBD | APBD | APBD |
| 5 | Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana | 20 | 11 | 11 | 11 | 8.278.875.300 | BPBD | APBD | APBD |
| | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar) | 1 | 1 | 1 | 1 | | BPBD | APBD | APBD |
| 2 | Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.) | 50 | 21 | 21 | 21 | | BPBD | APBD | APBD |
| 3 | Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.) | 26 | 10 | 10 | 10 | | BPBD | APBD | APBD |
| 4 | Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I) | 20 | 3 | 3 | 3 | | BPBD | APBD | APBD |
| 5 | Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung) | 20 | 3 | 3 | 3 | | BPBD | APBD | APBD |
| 6 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran) | 4 | 3 | 3 | 3 | | BPBD | APBD | APBD |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2025 | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|----|---|------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------|------------------|--------------------|----------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | | | | Anggaran |
| | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) | | | | | | | | |
| 1 | Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll) | 5000 | 5.000 | 5000 | 5000 | 55.000.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 2 | Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana) | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.153.700 | BPBD | APBD | APBD |
| 3 | Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana | 12 | 13 | 13 | 13 | 82.500.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 4 | Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana | 50 | 7 | 7 | 7 | | BPBD | APBD | APBD |
| 5 | Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana | 18 | 12 | 12 | 12 | 9.520.706.595 | BPBD | APBD | APBD |
| | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar) | 1 | 1 | 1 | 1 | | BPBD | APBD | APBD |
| 2 | Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.) | 44 | 23 | 23 | 23 | | BPBD | APBD | APBD |
| 3 | Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.) | 26 | 11 | 10 | 10 | | BPBD | APBD | APBD |
| 4 | Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I) | 18 | 3 | 3 | 3 | | BPBD | APBD | APBD |
| 5 | Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung) | 18 | 3 | 3 | 3 | | BPBD | APBD | APBD |
| 6 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran) | 4 | 4 | 3 | 3 | | BPBD | APBD | APBD |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2025 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|------------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 1 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1) | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) | | | | | | | | |
| 1 | Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional) | 60 | 40 | 40 | 40 | 49.500.000 | SAT POL PP | APBD | SATPOL PP |
| 2 | Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli) | 6 | 4 | 4 | 4 | 84.150.000 | SAT POL PP | APBD | SATPOL PP |
| 3 | Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM) | 663 | 35 | 35 | 35 | 52.041.825 | SAT POL PP | APBD | SATPOL PP |
| 4 | Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan) | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.686.860 | SAT POL PP | APBD | SATPOL PP |
| 5 | Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) | 8 | 8 | 8 | 8 | 165.000.000 | SAT POL PP | APBD | SATPOL PP |
| 6 | Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat) | 3 | 3 | 3 | 3 | 55.000.000 | SAT POL PP | APBD | SATPOL PP |
| 2) | Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan) | | | | | 35.000.000 | | | |
| 1 | Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal) | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.987.500 | BPBD | APBD | APBD |
| 2 | Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana | 300.701 | 51.198 | 51.198 | 51.198 | 16.500.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 3 | Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia) | 300.701 | 133.276 | 133.276 | 133.276 | 16.500.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 4 | Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana | 65 | 65 | 65 | 65 | 165.000.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 5 | Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana | 58 | 58 | 53 | 53 | 28.897.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 3) | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) | | | | | | | | |
| 1 | Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll) | 65 | 12 | 12 | 12 | 42.209.860 | BPBD | APBD | APBD |
| 2 | Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana) | 12 | 7 | 7 | 7 | 36.153.700 | BPBD | APBD | APBD |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2026 | | | | Anggaran | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|---|------------------------|-----------|--------------|-----------|----------------|----------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | | | | |
| | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) | | | | | | | | |
| 1 | Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll) | 5000 | 9.494 | 9.494 | 9.494 | 60.500.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 2 | Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparat yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana) | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.169.070 | BPBD | APBD | APBD |
| 3 | Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana | 12 | 14 | 14 | 14 | 90.750.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 4 | Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana | 50 | 8 | 8 | 8 | | BPBD | APBD | APBD |
| 5 | Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana | 18 | 13 | 13 | 13 | 10.948.812.584 | BPBD | APBD | APBD |
| | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar) | 1 | 1 | 1 | 1 | | BPBD | APBD | APBD |
| 2 | Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.) | 44 | 25 | 25 | 25 | | BPBD | APBD | APBD |
| 3 | Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.) | 26 | 12 | 12 | 12 | | BPBD | APBD | APBD |
| 4 | Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I) | 18 | 3 | 3 | 3 | | BPBD | APBD | APBD |
| 5 | Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung) | 18 | 3 | 3 | 3 | | BPBD | APBD | APBD |
| 6 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran) | 4 | 3 | 3 | 3 | | BPBD | APBD | APBD |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2026 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|------------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 1 | 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1) | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) | | | | | | | | |
| 1 | Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional) | 60 | 40 | 40 | 40 | 49.500.000 | SAT POL PP | APBD | SATPOL PP |
| 2 | Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli) | 6 | 4 | 4 | 4 | 84.150.000 | SAT POL PP | APBD | SATPOL PP |
| 3 | Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM) | 663 | 35 | 35 | 35 | 52.041.825 | SAT POL PP | APBD | SATPOL PP |
| 4 | Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan) | 1 | 1 | 1 | 1 | 27.155.546 | SAT POL PP | APBD | SATPOL PP |
| 5 | Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) | 8 | 8 | 8 | 8 | 181.500.000 | SAT POL PP | APBD | SATPOL PP |
| 6 | Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat) | 4 | 4 | 4 | 4 | 55.000.000 | SAT POL PP | APBD | SATPOL PP |
| 2) | Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan) | | | | | 42.000.000 | | | |
| 1 | Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal) | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.086.250 | BPBD | APBD | APBD |
| 2 | Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana | 317.267 | 56.318 | 56.318 | 56.318 | 18.150.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 3 | Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia) | 317.267 | 146.604 | 146.604 | 146.604 | 18.150.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 4 | Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana | 65 | 65 | 65 | 65 | 181.500.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 5 | Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana | 58 | 73 | 68 | 68 | 31.786.700 | BPBD | APBD | APBD |
| 3) | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) | | | | | | | | |
| 1 | Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll) | 65 | 13 | 12 | 12 | 46.430.846 | BPBD | APBD | APBD |
| 2 | Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana) | 12 | 8 | 8 | 8 | 39.769.070 | BPBD | APBD | APBD |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2027 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|------------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 1 | 2 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 1) | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) | | | | | | | | |
| 1 | Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional) | 60 | 40 | 40 | 40 | 54.450.000 | SAT POL PP | APBD | SATPOL PP |
| 2 | Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli) | 6 | 4 | 4 | 4 | 100.980.000 | SAT POL PP | APBD | SATPOL PP |
| 3 | Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM) | 663 | 35 | 35 | 35 | 62.450.191 | SAT POL PP | APBD | SATPOL PP |
| 4 | Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan) | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.871.101 | SAT POL PP | APBD | SATPOL PP |
| 5 | Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) | 8 | 8 | 8 | 8 | 199.650.000 | SAT POL PP | APBD | SATPOL PP |
| 6 | Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat) | 4 | 4 | 4 | 4 | 78.650.000 | SAT POL PP | APBD | SATPOL PP |
| 2) | Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan) | | | | | 42.350.000 | | | |
| 1 | Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal) | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.994.875 | BPBD | APBD | APBD |
| 2 | Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana | 333.833 | 61.950 | 61.950 | 61.950 | 19.965.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 3 | Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia) | 333.833 | 161.164 | 161.164 | 161.164 | 19.965.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 4 | Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana | 65 | 65 | 65 | 65 | 199.650.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 5 | Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana | 58 | 81 | 81 | 81 | 34.965.370 | BPBD | APBD | APBD |
| 3) | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) | | | | | | | | |
| 1 | Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll) | 65 | 14 | 14 | 14 | 51.073.931 | BPBD | APBD | APBD |
| 2 | Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana) | 12 | 9 | 9 | 9 | 43.745.977 | BPBD | APBD | APBD |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2027 | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|----|---|------------------------|-----------|--------------|-----------|----------------|------------------|--------------------|----------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | | | | Anggaran |
| | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) | | | | | | | | |
| 1 | Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll) | 5.000 | 5.000 | 5000 | 5000 | 66.550.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 2 | Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana) | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.985.977 | BPBD | APBD | APBD |
| 3 | Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana | 12 | 15 | 15 | 15 | 99.825.000 | BPBD | APBD | APBD |
| 4 | Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana | 50 | 9 | 9 | 9 | | BPBD | APBD | APBD |
| 5 | Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana | 18 | 14 | 14 | 14 | 12.591.134.472 | BPBD | APBD | APBD |
| | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) | | | | | | | | |
| 1 | Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar) | 1 | 1 | 1 | 1 | | BPBD | APBD | APBD |
| 2 | Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.) | 44 | 28 | 25 | 25 | | BPBD | APBD | APBD |
| 3 | Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.) | 26 | 13 | 12 | 12 | | BPBD | APBD | APBD |
| 4 | Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I) | 18 | 3 | 3 | 3 | | BPBD | APBD | APBD |
| 5 | Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung) | 18 | 3 | 3 | 3 | | BPBD | APBD | APBD |
| 6 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran) | 4 | 4 | 4 | 4 | | BPBD | APBD | APBD |

3.2.6. Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023-2027

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Satuan | Tahun Dasar (2022) | Pencapaian SPM 2023 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|--------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|------------|----------|------------------|--------------------|
| | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1) | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti | | | | | | | | | | |
| 1 | Layanan data dan pengaduan | Orang | 2022 | 367 | 367 | 367 | 367 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat | Orang | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan permakanaan | Orang | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penyediaan sandang | Orang | 2022 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Penyediaan alat bantu | Orang | 2022 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16.740.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 6 | Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | Orang | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 7 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Orang | 2022 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22.491.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 8 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar | Orang | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 9 | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | Orang | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 10 | Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan | Orang | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 11 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | Orang | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 12 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 2022 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8.566.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 13 | Layanan rujukan | Orang | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2) | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti | | | | | | | | | | |
| 1 | Layanan data dan pengaduan | Orang | 2022 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat | Orang | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan permakanaan | Orang | 2022 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penyediaan sandang | Orang | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.534.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Orang | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 6 | Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | Orang | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 7 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar | Orang | 2022 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 8 | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | Orang | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 9 | Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan | Orang | 2022 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 10 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | Orang | 2022 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 11 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 12 | Layanan rujukan | Orang | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3) | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti | | | | | | | | | | |
| 1 | Layanan data dan pengaduan | Orang | 2022 | 444 | 444 | 444 | 444 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat | Orang | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan permakanaan | Orang | 2022 | 50 | 42 | 42 | 42 | 19.354.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penyediaan sandang | Orang | 2022 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Penyediaan alat bantu | Orang | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 6 | Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | Orang | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 7 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Orang | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 8 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar | Orang | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 9 | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan | Orang | 2022 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 10 | Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan | Orang | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 11 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | Orang | 2022 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Satuan | Tahun Dasar (2022) | Pencapaian SPM 2023 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|--------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|----------|------------------|--------------------|
| | | | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 12 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 13 | Layanan rujukan | Orang | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4) | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti | | | | | | | | | | |
| 1 | Layanan data dan pengaduan | Orang | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat | Orang | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan permakanaan | Orang | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penyediaan sandang | Orang | 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | Orang | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 6 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Orang | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 7 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis | Orang | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 8 | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | Orang | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 9 | Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan | Orang | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 10 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | Orang | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 11 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 12 | Layanan rujukan | Orang | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.974.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5) | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan permakanaan | Orang | 2022 | 4804 | 4804 | 4804 | 4804 | 41.889.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan sandang | Orang | 2022 | 110 | 110 | 110 | 110 | 13.800.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan tempat penampungan pengungsi | Unit | 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.180.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penanganan khusus bagi kelompok rentan | Orang | 2022 | 32 | 32 | 32 | 32 | 136.923.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Pelayanan dukungan Psikososial | Orang | 2022 | 812 | 812 | 812 | 812 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2024 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|----------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1) | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti | | | | | | | | |
| 1 | Layanan data dan pengaduan | 367 | 367 | 367 | 367 | 1.331.400 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat | 50 | 50 | 50 | 50 | 19.762.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan permakanan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penyediaan sandang | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Penyediaan alat bantu | 5 | 5 | 5 | 5 | 64.931.400 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 6 | Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 7 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | 2 | 2 | 2 | 2 | 153.406.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 8 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 9 | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 10 | Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan | 55 | 55 | 55 | 55 | 316.200.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 11 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 12 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 2 | 2 | 2 | 2 | 16.954.800 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 13 | Layanan rujukan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2) | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti | | | | | | | | |
| 1 | Layanan data dan pengaduan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan permakanan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penyediaan sandang | 50 | 50 | 50 | 50 | 13.470.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 6 | Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 7 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 8 | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 9 | Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 10 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 11 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 12 | Layanan rujukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3) | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti | | | | | | | | |
| 1 | Layanan data dan pengaduan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan permakanan | 100 | 100 | 100 | 100 | 27.020.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penyediaan sandang | 100 | 100 | 100 | 100 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Penyediaan alat bantu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 6 | Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 7 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 8 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.200.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 9 | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.412.800 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 10 | Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 11 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2024 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|----------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 12 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 13 | Layanan rujukan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4) | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti | | | | | | | | |
| 1 | Layanan data dan pengaduan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan permakanan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penyediaan sandang | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 6 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 7 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 8 | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 9 | Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 10 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.101.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 11 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 12 | Layanan rujukan | 5 | 5 | 5 | 5 | 28.419.500 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5) | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan permakanan | 100 | 100 | 100 | 100 | 124.730.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan sandang | 100 | 100 | 100 | 100 | 49.100.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan tempat penampungan pengungsi | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.150.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penanganan khusus bagi kelompok rentan | 50 | 50 | 50 | 50 | 48.750.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Pelayanan dukungan Psikososial | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.800.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2025 | | | | Anggaran | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|----------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | | | | |
| 1 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1) | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti | | | | | | | | |
| 1 | Layanan data dan pengaduan | 500 | 500 | 500 | 500 | 20.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat | 50 | 50 | 50 | 50 | 30.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan permakanaan | 25 | 25 | 25 | 25 | 50.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penyediaan sandang | 100 | 100 | 100 | 100 | 200.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Penyediaan alat bantu | 20 | 20 | 20 | 20 | 120.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 6 | Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 7 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | 5 | 5 | 5 | 5 | 200.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 8 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar | 5 | 5 | 5 | 5 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 9 | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 10 | Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan | 60 | 60 | 60 | 60 | 400.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 11 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 12 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 2 | 2 | 2 | 2 | 17.500.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 13 | Layanan rujukan | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2) | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti | | | | | | | | |
| 1 | Layanan data dan pengaduan | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan permakanaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penyediaan sandang | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 6 | Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 7 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 8 | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 9 | Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 10 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 11 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 12 | Layanan rujukan | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3) | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti | | | | | | | | |
| 1 | Layanan data dan pengaduan | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan permakanaan | 100 | 100 | 100 | 100 | 30.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penyediaan sandang | 100 | 100 | 100 | 100 | 25.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Penyediaan alat bantu | 5 | 5 | 5 | 5 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 6 | Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | 5 | 5 | 5 | 5 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 7 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 8 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 9 | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.500.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 10 | Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.500.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 11 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2025 | | | | Anggaran | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|----------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | | | | |
| 12 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 13 | Layanan rujukan | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4) | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti | | | | | | | | |
| 1 | Layanan data dan pengaduan | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan permakanaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penyediaan sandang | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.500.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 6 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 7 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 8 | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.500.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 9 | Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 10 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 11 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 12 | Layanan rujukan | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5) | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan permakanaan | 100 | 100 | 100 | 100 | 175.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan sandang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan tempat penampungan pengungsi | 1 | 1 | 1 | 1 | 150.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penanganan khusus bagi kelompok rentan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Pelayanan dukungan Psikososial | 100 | 100 | 100 | 100 | 50.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2026 | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | |
|----|--|------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | | | | Anggaran |
| 1 | 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 33 | 34 | 35 |
| 1) | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti | | | | | | | | |
| 1 | Layanan data dan pengaduan | 600 | 600 | 600 | 600 | 30.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat | 60 | 60 | 60 | 60 | 45.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan permakanan | 30 | 30 | 30 | 30 | 60.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penyediaan sandang | 120 | 120 | 120 | 120 | 240.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Penyediaan alat bantu | 30 | 30 | 30 | 30 | 150.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 6 | Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 7 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | 5 | 5 | 5 | 5 | 200.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 8 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar | 5 | 5 | 5 | 5 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 9 | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 10 | Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan | 70 | 70 | 70 | 70 | 500.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 11 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 12 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 2 | 2 | 2 | 2 | 17.500.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 13 | Layanan rujukan | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2) | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti | | | | | | | | |
| 1 | Layanan data dan pengaduan | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan permakanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penyediaan sandang | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 6 | Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 7 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 8 | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 9 | Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 10 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 11 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 12 | Layanan rujukan | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3) | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti | | | | | | | | |
| 1 | Layanan data dan pengaduan | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan permakanan | 200 | 200 | 200 | 200 | 40.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penyediaan sandang | 200 | 200 | 200 | 200 | 50.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Penyediaan alat bantu | 5 | 5 | 5 | 5 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 6 | Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | 5 | 5 | 5 | 5 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 7 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 8 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 9 | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.500.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 10 | Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.500.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 11 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2026 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|----------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 12 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 13 | Layanan rujukan | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4) | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti | | | | | | | | |
| 1 | Layanan data dan pengaduan | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan permakanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penyediaan sandang | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.500.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 6 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 7 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 8 | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.500.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 9 | Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 10 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 11 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 12 | Layanan rujukan | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5) | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan permakanan | 150 | 150 | 150 | 150 | 200.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan sandang | 150 | 150 | 150 | 150 | 150.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan tempat penampungan pengungsi | 1 | 1 | 1 | 1 | 150.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penanganan khusus bagi kelompok rentan | 150 | 150 | 150 | 150 | 150.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Pelayanan dukungan Psikososial | 150 | 150 | 150 | 150 | 75.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2027 | | | | | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|----------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | Anggaran | | | |
| 1 | 2 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 1) | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti | | | | | | | | |
| 1 | Layanan data dan pengaduan | 700 | 700 | 700 | 700 | 40.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat | 75 | 75 | 75 | 75 | 55.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan permakanaan | 50 | 50 | 50 | 50 | 100.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penyediaan sandang | 150 | 150 | 150 | 150 | 300.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Penyediaan alat bantu | 40 | 40 | 40 | 40 | 200.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 6 | Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 7 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | 5 | 5 | 5 | 5 | 200.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 8 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar | 5 | 5 | 5 | 5 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 9 | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 10 | Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan | 75 | 75 | 75 | 75 | 600.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 11 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 12 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 2 | 2 | 2 | 2 | 17.500.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 13 | Layanan rujukan | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2) | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti | | | | | | | | |
| 1 | Layanan data dan pengaduan | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan permakanaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penyediaan sandang | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 6 | Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 7 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 8 | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 9 | Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 10 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 11 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 12 | Layanan rujukan | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3) | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti | | | | | | | | |
| 1 | Layanan data dan pengaduan | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan permakanaan | 250 | 250 | 250 | 250 | 50.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penyediaan sandang | 300 | 300 | 300 | 300 | 60.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Penyediaan alat bantu | 5 | 5 | 5 | 5 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 6 | Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | 5 | 5 | 5 | 5 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 7 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 8 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 9 | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.500.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 10 | Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.500.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 11 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |

| NO | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Pencapaian SPM 2027 | | | | Anggaran | Inisiasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana |
|----|--|------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|----------|------------------|--------------------|
| | | Penerima Layanan Dasar | Realisasi | Mutu Layanan | Realisasi | | | | |
| 12 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 13 | Layanan rujukan | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4) | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti | | | | | | | | |
| 1 | Layanan data dan pengaduan | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan permakanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penyediaan sandang | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.500.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 6 | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 7 | Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 8 | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.500.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 9 | Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 10 | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 11 | Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 12 | Layanan rujukan | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5) | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan permakanan | 200 | 200 | 200 | 200 | 300.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 2 | Penyediaan sandang | 200 | 200 | 200 | 200 | 250.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 3 | Penyediaan tempat penampungan pengungsi | 1 | 1 | 1 | 1 | 170.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 4 | Penanganan khusus bagi kelompok rentan | 150 | 150 | 150 | 150 | 150.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |
| 5 | Pelayanan dukungan Psikososial | 150 | 150 | 150 | 150 | 75.000.000 | DSP3A | APBD | DSP3A |

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa:” Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai kepenjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub system perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang di mulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang di jadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkan kannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah

- kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah
- Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, di operasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun di sepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD
 - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

Salah satu pendekatan yang di gunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrument pendukung seperti indicator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indicator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan public atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indicator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-Perangkat Daerah.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrument pendukung seperti indicator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indicator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PD. Sejalan dengan hal tersebut, maka indicator

pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-PD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhakdi peroleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain pemantauan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap semester.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensiaktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baikakan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukanguna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumberdaya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumberdaya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian perkembangan hasil**, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. *Ketaatan/compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. *Pemeriksaan/auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. *Laporan/accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahansosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudahperiode waktu tertentu.

- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapaiter hadap *output*. Evaluasi biasa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasiter hadap pencapaian SPM di Kabupaten Bengkayang, maka indicator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapaiatau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, makadapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik darisisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

a. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:

(a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?

- (b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 - (c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 - (d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- b. **Koordinasi**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 - 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
 - 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 5) Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- c. **Manajemen Kerja**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?

- 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- d. **Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- 1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
 - 2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
 - 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
 - 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
 - 5) Apakah ada sumber dana non pemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
 - 6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran non pemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
 - 7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan table dasar yang ada dalam Rencana Aksise bagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator SPM | Satuan | Target | Realisasi | Presentase Capaian | Permasalahan |
|----|-----------------------|---------------|--------|--------|-----------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi di buat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati, Bupati-Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.

Analisis capaian SPM mengacu pada materiutama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Analisis tersebut, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
- 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;

- 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
 - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 - 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program dan bertujuan untuk mengetahui apakah suatu program telah tercapai dan tepat sasaran atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang masih rendah yang diakibatkan rendahnya penganggaran penerapan SPM Daerah sehingga pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat masih belum maksimal. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemeruan SPM, yang memuat program, kegiatan dan su kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini nantinya akan menjadi pedoman dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran di daerah selama 5 Tahun ke depan.

5.2. Saran

1. Prioritas pemenuhan SPM yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021 bahwa sasaran pemenuhan SPM diterapkan berdasarkan pemenuhan yang ditujukan kepada Warga Negara dengan memprioritaskan masyarakat miskin dan tidak mampu, sehingga perlu sosialisasi Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 di daerah, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Bengkayang.
2. Perlu penguatan Tim Penerapan SPM Kabupaten Bengkayang yang berkaitan dengan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan adalah yang memang sudah diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan SPM yang tercantum Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

3. Tim penerapan SPM Kabupaten Bengkayang secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran
4. Perlu bimbingan kepada Tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulan yang dilaporkan ke dalam aplikasi E-SPM yaitu : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login>.
5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Kabupaten Bengkayang.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS